



TAHUN - TAHUN MENENTUKAN

**TINJAUAN TEMATIK KINERJA
EKONOMI **JOKOWI - JK****

“Jangan kita raker-raker, tapi tidak memunculkan sesuatu yang baru, tidak memunculkan tindakan baru, tidak memunculkan ide baru dan gagasan baru untuk bersaing dengan negara lain,” kata Presiden Joko Widodo. dengan nada tinggi, di depan para menterinya akhir bulan lalu.

Jokowi marah karena nilai ekspor Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang memiliki modal dasar lebih kecil: jumlah penduduk yang lebih sedikit, luas wilayah lebih kecil, dan kekayaan alam yang lebih terbatas. Yang jadi sasaran kemarahan adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Kemarahan Presiden kepada kedua menteri tersebut menimbulkan tanda tanya, karena nilai ekspor sebuah negara tidak selalu berkorelasi positif dengan kekayaan alam, apalagi jumlah penduduk. Terlebih, untuk kasus Indonesia yang nilai ekspornya sangat dipengaruhi komoditas, dengan porsi mencapai 65%. Celakanya, ekspor komoditas tersebut mayoritas masih berbentuk bahan mentah atau bahan baku yang nilai tambahnya masih rendah, seperti misalnya minyak sawit mentah (*crude palm oil* CPO) dan batu bara.

Ini adalah problem klasik. Dari masa revolusi sampai dengan sekarang, semua tahu bahwa ekspor bahan mentah memiliki nilai tambah kecil dibandingkan dengan produk manufaktur yang banyak diproduksi negara tetangga. Apalagi, jika harga komoditas dunia—yang ironisnya ditentukan di bursa komoditas negara pembeli—sedang tertekan.

Di tengah situasi ini, tidak banyak yang bisa dilakukan Indonesia Promotion Trade Center (IPTC) untuk menggenjot penjualan. Ibaratnya, persoalan rendahnya nilai ekspor bukan di “etalase toko”, melainkan di “dapur” kita dan “barang” yang kita jual. Problemnnya sudah teridentifikasi sejak lama, yakni hilirisasi. Persoalannya hanya pada pelaksanaan, di mana pemerintah tidak bisa menggenjot manufakturnya untuk memproses komoditas-komoditas andalan Indonesia menjadi barang bernilai tambah.

Apalagi, data terbaru menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami deindustrialisasi dengan kontribusi ke produk domestik bruto (PDB) yang terus menurun, menjadi 20,2% (2017) dibandingkan dengan 20,8% (2016). Pada triwulan 4/2017, industri pengolahan tumbuh hanya 4,46% melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,85%.

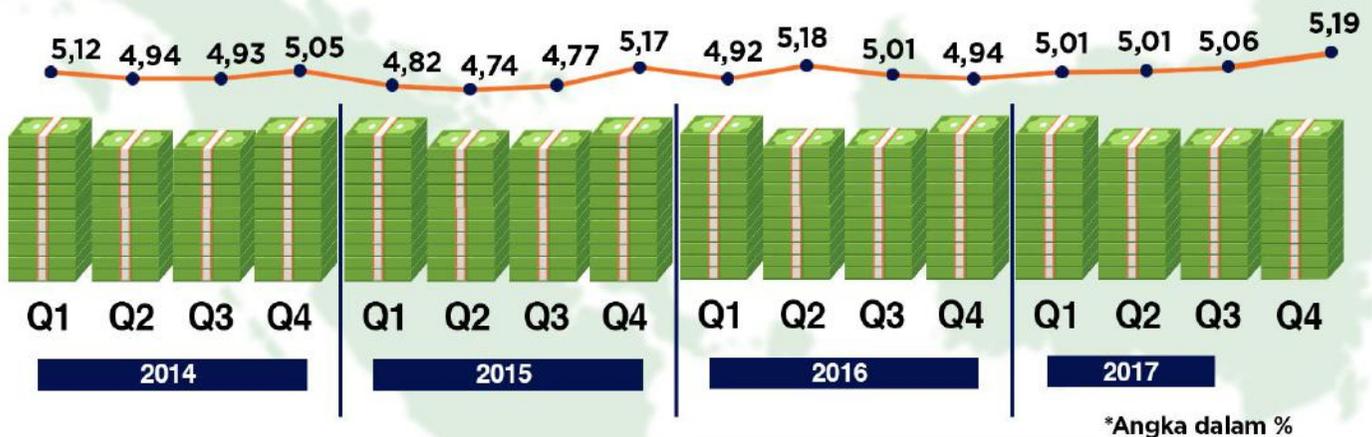
Melihat kondisi seperti ini, Presiden Jokowi telah mengambil kebijakan tepat dengan menggenjot infrastruktur dan memangkas deregulasi. Mungkin dia kemarin hanya lupa menyentil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang kebetulan juga Ketua Partai Golkar, yang di bawahnya lah kebijakan terkait daya saing produk-produk Indonesia diramu.***

BAB 1

Saatnya 'Move On' dari Komoditas

Memasuki tahun ke-3 pemerintahan Jokowi-JK, perjalanan ekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil, dengan pertumbuhan konsisten di kisaran 4,8%-5,2% (*year on year/YoY*) pada medio 2015-2017 (lihat tabel 1). Pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2017 tetap stabil di 5,07%, dan pemerintah memprediksinya naik menjadi 5,4% pada 2018.

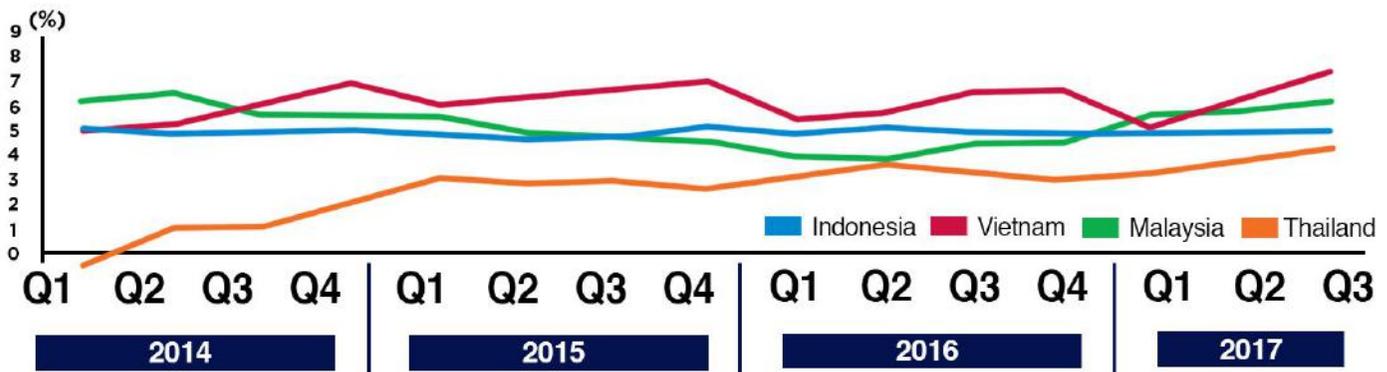
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (YoY)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah Tim Riset CNBC

Jika dibandingkan dengan tiga negara tetangga di Asia Tenggara (Malaysia, Vietnam, dan Thailand), Indonesia menunjukkan pola pertumbuhan paling stagnan selama 2014-2017 (lihat tabel 2). Di saat tiga negara tetangga menikmati percepatan pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak mendatar. Ekonomi Vietnam, misalnya, tumbuh 6,28% pada kuartal III-2017, meski bergerak dari titik yang sama dengan Indonesia (di kisaran 5%) pada kuartal I-2014.

PERTUMBUHAN EKONOMI (YoY) 4 NEGARA TETANGGA



(3)

BAB 1

Saatnya 'Move On' dari Komoditas

Laju ekonomi Indonesia yang relatif lamban dibandingkan dengan negara tetangga ini terkait erat dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cenderung stagnan di kisaran 4,93%-5,07% (YoY), dengan rerata pertumbuhan 5,01% selama 2015-2017 (lihat tabel 3). Padahal, sektor ini menyumbang lebih dari 50% bagi PDB Indonesia.

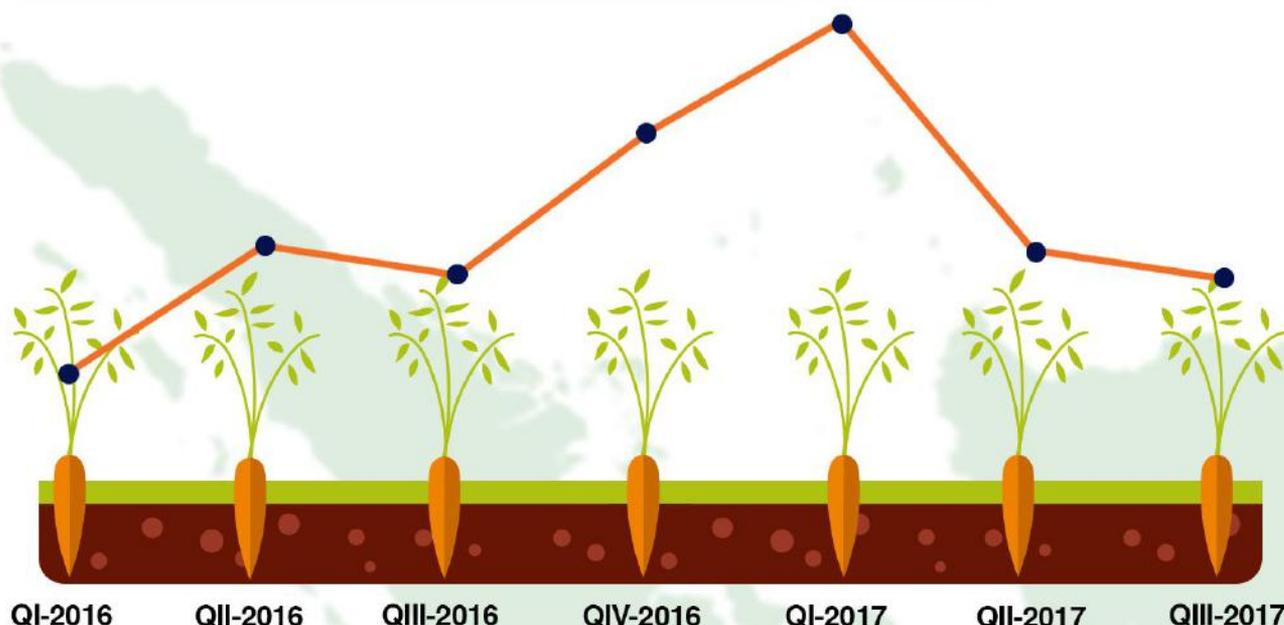
PDB Berdasarkan Pengeluaran	2014					2015					2016					2017				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
Konsumsi Rumah Tangga	5.23	5.15	5.12	5.08	5.15	5.01	4.97	4.95	4.93	4.96	4.97	5.07	5.01	4.99	5.01	4.94	4.95	4.93	4.97	4.95
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	23.15	22.42	5.76	-0.49	12.19	-8.06	-7.98	6.57	8.33	-0.62	6.40	6.71	6.64	6.72	6.62	8.05	8.51	6.01	5.24	6.91
Konsumsi Pemerintah	6.06	-1.84	1.17	0.87	1.16	2.91	2.61	7.09	7.12	5.32	3.43	6.23	-2.95	-4.05	-0.15	2.67	-1.93	3.46	3.81	2.14
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5.44	4.02	4.35	4.05	4.45	4.60	4.01	4.93	6.43	5.01	4.67	4.18	4.24	4.80	4.48	4.78	5.35	7.11	7.27	6.15
Ekspor	3.14	1.45	4.94	-4.45	1.07	-0.68	-0.26	-0.95	-6.38	-2.12	-3.29	-2.18	-5.65	4.24	-1.74	8.74	3.60	17.27	8.50	9.09
Impor	5.06	0.43	0.21	2.98	2.12	-2.63	-7.37	-6.65	-8.75	-6.41	-5.14	-3.20	-3.67	2.82	-2.27	5.11	0.22	15.09	11.81	8.06
Produk Domestik Bruto	5.12	4.94	4.93	5.05	5.01	4.82	4.74	4.77	5.17	4.88	4.92	5.18	5.01	4.94	5.02	5.01	5.01	5.06	5.19	5.07

Sumber : BPS, diolah oleh Tim Riset CNBC Indonesia

Sebuah catatan khusus bagi Jokowi-JK, rerata pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebelumnya cukup kuat dengan rerata pertumbuhan 5,52% (2012-2013). Namun memasuki 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bahkan tidak mampu menyentuh angka 5%. Beberapa penjelasan mengenai pemicu turunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga sudah sering diangkat, misalnya kenaikan tarif listrik.

Selain itu, tertekannya sektor pertanian dan perkebunan sejak kuartal II-2017 juga berkontribusi bagi pelemahan konsumsi masyarakat, mengingat sektor ini menampung hampir 30% pekerja nasional (per Agustus 2017). Penurunan harga pangan menyebabkan sektor ini tumbuh melambat. Harga minyak sawit mentah (CPO) turun 22,88% setahun terakhir, sementara harga karet turun 40,9% dipicu penggunaan karet sintetis.

PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN (YoY, dalam persen)



Sumber: BPS, diolah oleh Tim Riset CNBC

Di saat konsumsi rumah tangga lesu, seharusnya komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebagai kontributor terbesar kedua bagi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi bahan bakar alternatif. Sayangnya, pertumbuhan PMTDB—yang megejawahtah dalam belanja investasi—selama masa pemerintahan Jokowi-JK melemah, stagnan di kisaran 32% dalam 3 tahun terakhir.

Di era Jokowi-JK, berbagai reformasi struktural berupa deregulasi dan pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI), sebenarnya memicu pertumbuhan investasi, terlihat dari realisasi investasi kuartal III-2017 yang mencapai Rp 176,6 triliun, atau naik 47,29% dibandingkan dengan kuartal III-2014. Namun stagnasi komponen PMTDB ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi yang berkualitas, utamanya yang lebih terfokus pada sektor *tradable*.

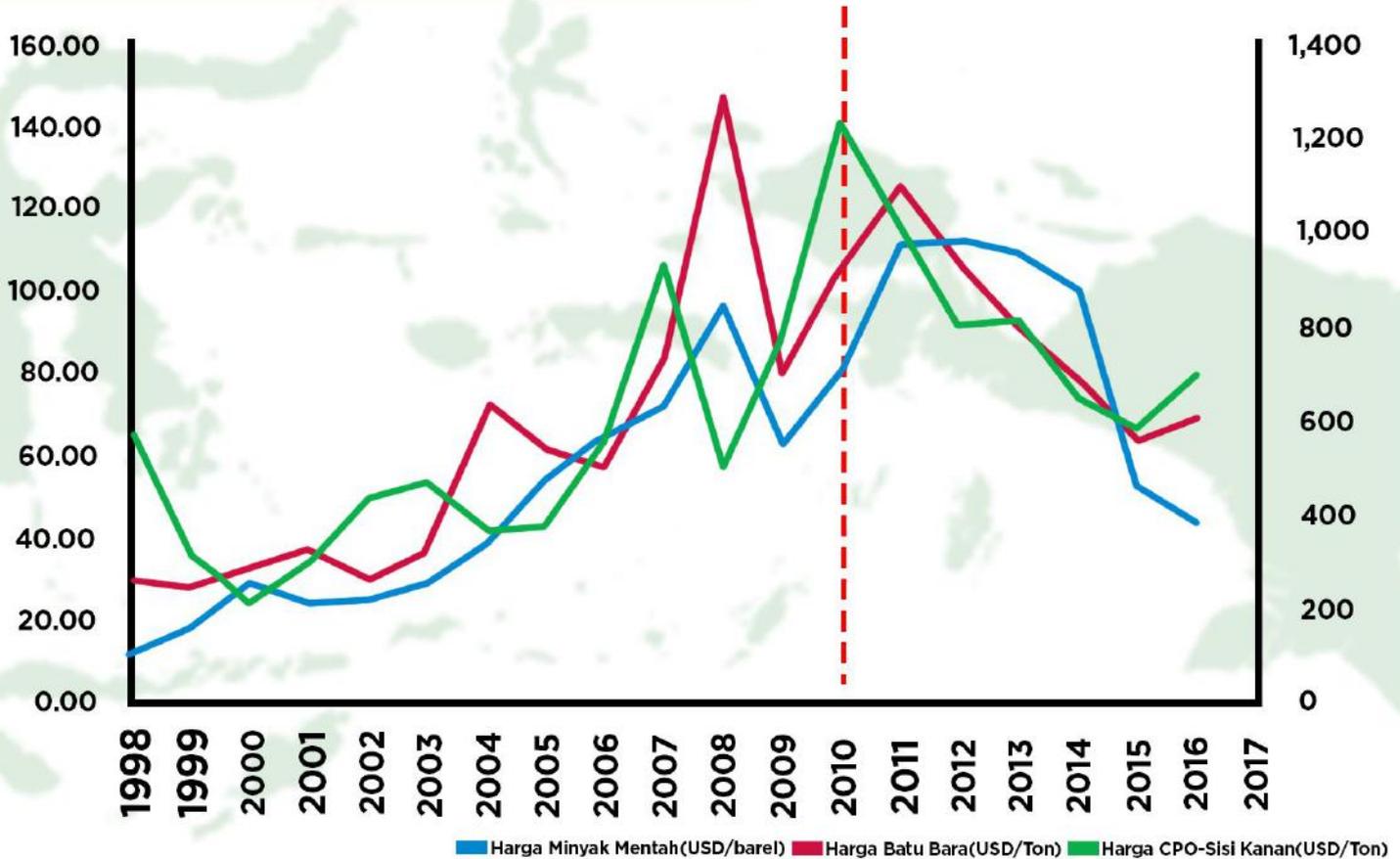
Dua tahun awal pemerintahan Jokowi-JK yang diwarnai dengan tertekannya sektor ekspor Indonesia. Dari kuartal IV-2014 hingga kuartal III-2016, pertumbuhan ekspor RI selalu bergerak di teritori negatif. Baru setelah memasuki kuartal IV-2016, kinerja ekspor membaik hingga pertumbuhannya mencapai 17,27% pada kuartal III-2017.

(5)

Saatnya 'Move On' Dari Komoditas

Perkembangan ekspor Indonesia sangat berkorelasi erat dengan harga komoditas global seperti minyak, CPO, minyak mentah, dan batu bara. Harga minyak bumi dan batu bara, memang turun signifikan dalam 6 tahun (2010-2016), masing-masing sebesar 41,21% dan 28,11%. Namun memasuki 2017, harga keduanya membaik. Tercatat pada kuartal III-2017, harga batu bara dan minyak mentah telah naik masing-masing sebesar 68,42% dan 13,46% dibandingkan kuartal III-2015.

HARGA KOMODITAS UTAMA GLOBAL



Sumber: Diolah oleh Tim Riset CNBC

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun sejak 2011 menyusul koreksi harga komoditas global. Padahal, pada medio 2001-2010, harga komoditas cenderung naik (penurunan signifikan hanya terjadi pada 2009 saat terjadi krisis *subprime mortgage loan* di AS).

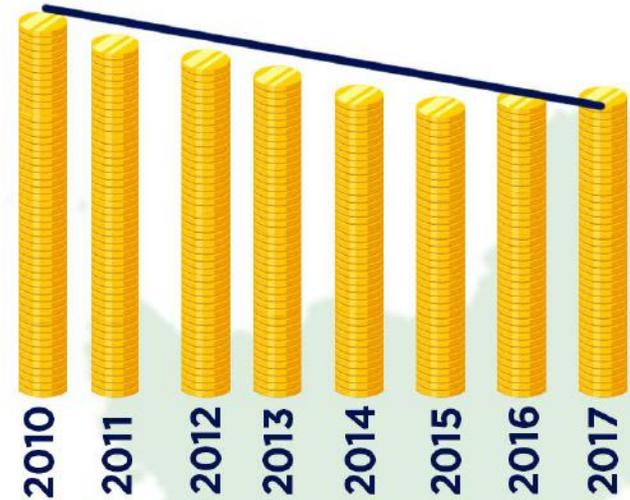
BAB 1

Saatnya 'Move On' Dari Komoditas

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 1999-2010



PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2010-2017



Sumber : Sumber: World Bank, diolah Tim Riset CNBC

Ketergantungan yang besar pada harga komoditas ini jelas tidak bisa terus dibiarkan. Hilirisasi industri khususnya menggenjot nilai tambah produk ekspor harus segera dituntaskan. Pemerintahan Jokowi-JK juga sebenarnya menyadari hal ini dengan menggalakkan kebijakan hilirisasi industri di sejumlah sektor industri seperti pengolahan karet dan pembangunan smelter barang tambang.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Oktober 2017, kebijakan peningkatan nilai tambah mineral berhasil mendorong investasi pada sektor industri pengolahan dan pemurnian logam. Tercatat sampai Oktober 2017, investasi yang telah ditanamkan untuk pembangunan fasilitas pemurnian nikel di dalam negeri mencapai Rp 68 triliun, berujung pada 13 fasilitas pemurnian nikel.

Pada komoditas bauksit, investasi yang telah ditanamkan mencapai Rp 20 triliun dengan kemampuan mengolah 4,4 juta tin bauksit di dalam negeri, dan telah mampu memproduksi 700 ribu ton alumina.

Saatnya 'Move On' Dari Komoditas

Karena itu, ketika Jokowi mengeluhkan tentang kecilnya nilai ekspor Indonesia, maka anak panah mestinya diarahkan pada Kementerian Perindustrian juga, dan juga pemerintah daerah, yang gagal membangun iklim industri yang kondusif (dari sisi regulasi maupun insentif) guna mempercepat hilirisasi di sektor manufaktur.

Dus, Indonesia hanya menghasilkan dan mengekspor barang-barang dengan nilai tambah rendah. Dengan realita demikian, seandainya menteri perdagangan turun langsung menjajakan produk-produk Indonesia, nilai ekspornya tetap tidak akan setara dengan yang dibukukan oleh negara-negara tetangga. Problemnya bukan pada penjual, tapi lebih pada barang yang dijual. ***

Jokowi berhak mendapatkan titel sebagai presiden yang menelurkan paket kebijakan deregulasi terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi telah dirilis pemerintahannya di bawah Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

Paket kebijakan tersebut (lihat tabel 1) ditujukan untuk menyederhanakan perizinan investasi di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu *bottleneck* dari investasi. Sebanyak delapan paket kebijakan ekonomi dirilis pada 2015, dan delapan sisanya pada 2016 dan 2017.

Presiden Soeharto, sebagai perbandingan, selama 32 tahun pemerintahannya hanya menelurkan enam kebijakan deregulasi ekonomi, yakni; Peraturan 3 Oktober 1966 tentang pembukaan penanaman modal asing; paket deregulasi 1982 tentang mata uang, pajak dan subsidi; paket deregulasi perbankan 1983; paket 1987 tentang penyederhanaan aturan; Pakto 1988 tentang deregulasi perbankan; dan paket deregulasi 1998 di bawah intervensi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di sisi lain banyak melakukan kebijakan deregulasi, terutama terkait dengan daftar negatif investasi (DNI). Hanya saja, penyederhanaan perizinan masih menjadi pekerjaan besar, dan saat itu kebijakan yang dihasilkan tidak dibungkus sebagai 'paket kebijakan'.

HARMONISASI PERATURAN	PENYEDERHANAAN BIROKRASI	MEMASTIKAN PENEGAKAN HUKUM
<p>Paket 1 9 Sept 2015</p> <p>Memperbaiki daya saing industri nasional</p>		<p>Paket 9 9 Jan 2016</p> <p>Mempercepat proyek listrik, stabilisasi harga daging, perbaikan sektor logistik</p>
<p>Paket 2 29 Sept 2015</p> <p>Menyederhanakan proses perizinan dan ekspor</p>		<p>Paket 10 11 Feb 2016</p> <p>Revisi DNI dan memperbaiki perlindungan UMKM</p>
<p>Paket 3 7 Okt 2015</p> <p>Mempercepat investasi, mendorong ekspor, menjaga daya beli</p>		<p>Paket 11 29 Mar 2016</p> <p>Menstimulasi perekonomian lewat fasilitasi UMKM dan industri</p>

Pacu Investasi dengan Deregulasi

Paket 4 15 Okt 2015

Menyederhanakan formula penggajian & memperluas kredit IKM

Paket 5 22 Okt 2015

Memperbaiki iklim investasi dengan insentif pajak & deregulasi bank syariah

Paket 6 5 Nov 2015

Menstimulasi perekonomian di kawasan perbatasan

Paket 7 7 Des 2015

Menstimulasi industri padat karya dengan percepatan pengurusan sertifikat lahan

Paket 8 21 Des 2015

Mengatasi sengketa akuisisi lahan, percepatan produksi minyak, dan suku cadang industri penerbangan

Paket 12 28 April 2016

Perbaiki peringkat kemudahan bisnis

Paket 13 24 Agt 2016

Perumahan murah untuk masyarakat menengah ke bawah

Paket 14 10 Nov 2016

Peta jalan E-commerce

Paket 15 15 Juni 2017

Pengembangan bisnis dan daya saing penyedia jasa logistik nasional

Paket 16 15 Juni 2017

Percepatan penerbitan izin dari pusat hingga daerah

Sumber : Kementerian Perekonomian

Gebrakan ini mendapat respon positif dari berbagai lembaga internasional, minimal dengan membaiknya ekspektasi mereka terhadap perekonomian Indonesia baik berupa peringkat utang yang dinaikkan atau diafirmasi menjadi 'layak investasi', maupun survei *ease of doing business* (lihat tabel 2).

KATEGORI	PERIODE	PEMERINGKAT	PERINGKAT
Layak Investasi	2017	S&P	BBB-
Layak Investasi	2017	Fitch Rating	BBB (dari BBB-)
Kemudahan Berusaha	2018	Bank Dunia	72 (naik 19 peringkat)
Tujuan Utama Investasi Dunia	2017	UNCTAD	4 (naik 4 peringkat)
Indeks daya saing global (GCI)	2018	WEF	36 (naik 5 peringkat)

Sumber : Diolah CNBC Indonesia

Meski pemerintahan Jokowi menjadi yang terbanyak mengeluarkan kebijakan deregulasi, dalam tempo yang hanya dua tahun, tetapi efek pengumuman kebijakan tersebut tidak banyak memengaruhi kinerja penanaman modal pada periode 2015-2016. Di atas kertas, pemodal terus menaikkan realisasi investasi mereka bahkan sebelum paket kebijakan itu dirilis, seperti terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah ini (lihat tabel 3).

TAHUN	NILAI (Rp Triliun)	PERTUMBUHAN (%)
2014	463	16,04
2015	545	17,71
2016	613	12,48
2017	692,8	13,02

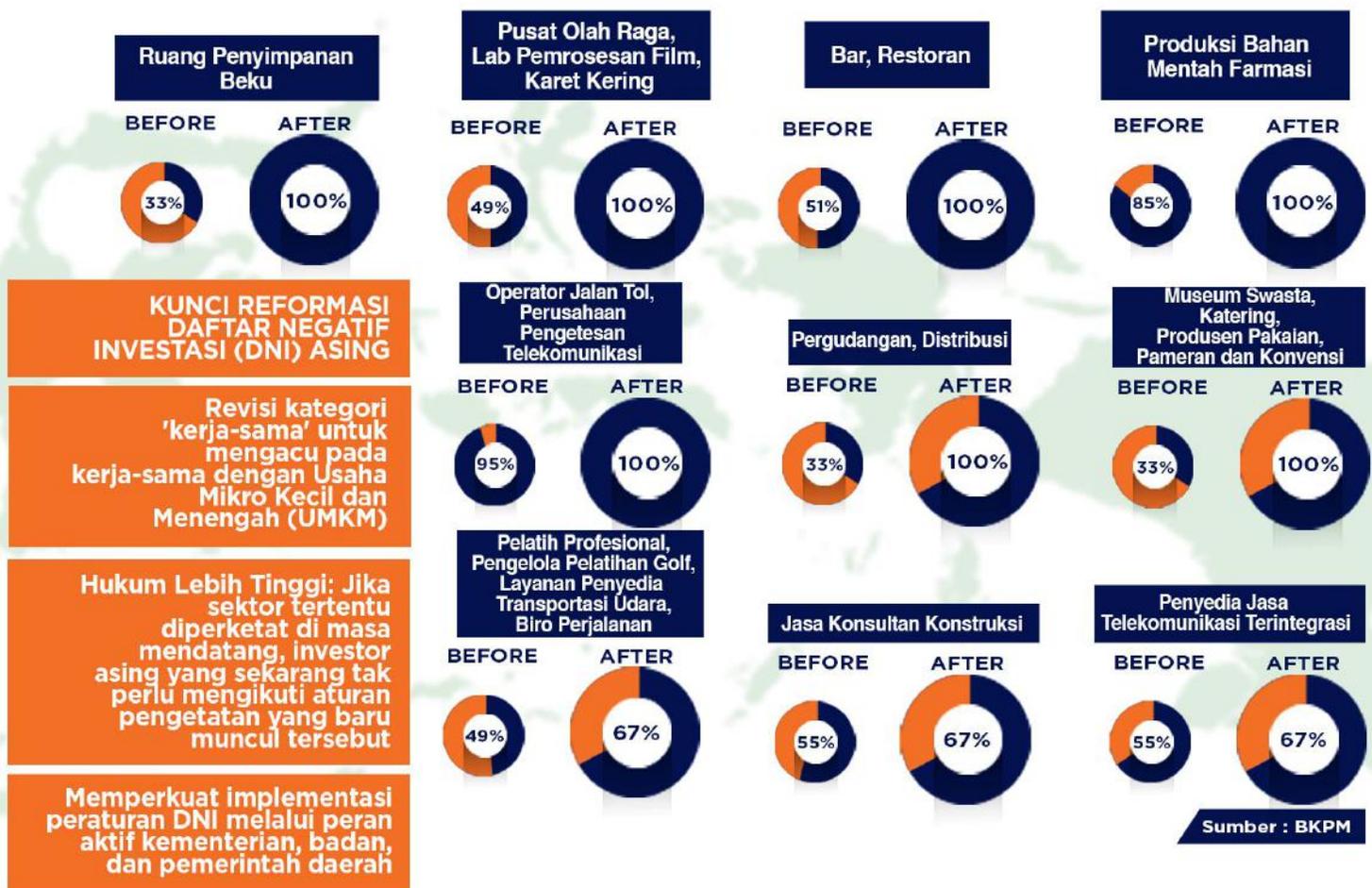
Sumber : BKPM

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi investasi tumbuh 16,04% pada 2014, dan menguat lagi pada 2015 sebesar 17,71%. Namun, pertumbuhan itu justru melambat setahun setelah paket kebijakan tersebut diumumkan, yakni menjadi 12,48% pada 2015. Penjelasananya sederhana. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi pada saat itu belum serta-merta ditransmisikan langsung ke tingkat birokrasi lebih rendah terutama pemerintah daerah.

Hanya saja, ada peluang bahwa realisasi investasi tahun ini meningkat melampaui target yang dipatok pemerintah, salah satunya karena kebijakan deregulasi tersebut mulai berefek, minimal di tingkat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satunya adalah kebijakan *one stop service* (OSS) untuk pelayanan investasi. Sebanyak 191 proyek, mengutip BKPM, telah menikmati fasilitas perizinan 3 jam ini karena memenuhi semua persyaratannya: nilai minimal investasi sebesar Rp 100 miliar atau mempekerjakan lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal.

Pacu Investasi dengan Deregulasi

Di luar itu, 115 proyek kakap telah memanfaatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), dengan memanfaatkan 32 kawasan industri yang telah ditunjuk untuk memberikan pelayanan tersebut. Aliran investasi bernilai besar itu terjadi menyusul langkah pemerintah yang kian melonggarkan kepemilikan asing di sektor strategis (lihat tabel 4).



Meski demikian, untuk perizinan investasi di luar itu, para pemodal harus lebih bersabar, karena sejauh ini dari target 233 kebijakan yang akan disederhanakan, pemerintah baru berhasil menyelesaikan 11 di antaranya dalam tiga tahun terakhir. Sebanyak 217 lain, atau 97% dari target, masih dalam proses dengan 50 peraturan masih digodok di kantor presiden, dan 167 di kementerian/lembaga.

Dalam satu kesempatan, Darmin mengakui bahwa 16 paket kebijakan itu masih terhambat implementasinya, sehingga pihaknya memperkirakan kesemuanya tidak akan bisa dituntaskan pada periode pertama pemerintahan Jokowi.

Di penghujung dua tahun pada periode pertama pemerintahan Jokowi, para konstituen tentu menyoroti keseriusan Presiden yang juga mantan pengusaha ini untuk menunjukkan kelasnya merampungkan pekerjaan yang para penerusnya belum sempat mengegolkannya: yakni penyederhanaan investasi hingga ke tingkat daerah.

Dalam posisi seperti sekarang, Presiden idealnya bisa memakai perangkat fiskal, seperti dana alokasi umum (DAU) untuk mengikat pemerintah daerah (pemda) agar mematuhi kebijakan penyederhanaan izin investasi.

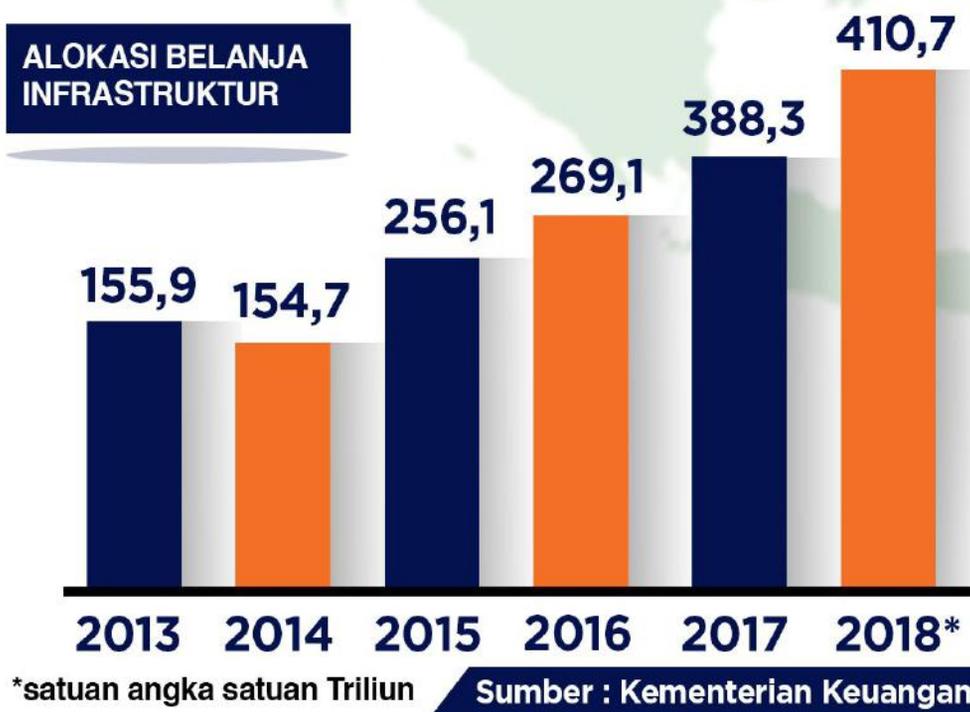
Seperti diketahui, DAU cenderung bersifat *block grant* guna menyeimbangkan fiskal pemerintah daerah. Selama ini, DAU dikucurkan dengan mengacu pada kinerja fiskal di daerah yakni pelaporan Peraturan Daerah (Perda) APBD dan laporan realisasi APBD semester 1 serta pertanggung-jawabannya.

Menurut pasal 27 ayat 4 di Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, DAU hanya dialokasikan berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Ke depan, pemerintah pusat semestinya diberi kewenangan memasukkan variabel yang terukur, yakni kemampuan pemda mendukung program ekonomi pemerintah pusat, dalam mengalokasikan DAU.***

Ambisi Infrastruktur Himpit Raksasa Negeri

Pemerintah Jokowi memiliki ambisi besar mengencakan pembangunan infrastruktur, untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ambisi besar ini, dalam konteks sekarang, menjadi keharusan ketika semua negara saling bersaing menarik investasi asing guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masing-masing. Infrastruktur dalam hal ini bisa diibaratkan sebagai sendi perekonomian, yang menopang arus logistik barang sebagai nadi perekonomian.

Ambisi tersebut tidak berakhir sebagai janji kampanye semata, melainkan benar-benar ditunjukkan dengan kenaikan drastis anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada akhir tahun lalu, misalnya, belanja infrastruktur di APBN dipatok senilai Rp388,3 triliun, naik dua kali lipat dari 2014 ketika Jokowi menerima mandat sebagai pemimpin tertinggi Republik ini (lihat tabel 1).



Jika bicara realisasi, kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai tiang pancang dan alat berat beroperasi di titik-titik mega proyek yang ditargetkan menjadi prioritas tahun ini, mulai dari proyek *mass rapid transit* (MRT) di Jakarta, pelabuhan Patimban di Jawa Barat, hingga jalan tol di Balikpapan.

Ambisi Infrastruktur Himpit Raksasa Negeri

Presiden Jokowi mencanangkan 245 proyek strategis nasional dengan total investasi US\$372,2 miliar (Rp 5.000 triliun). Sebanyak empat proyek prioritas berhasil diselesaikan, dengan 147 lain masih dalam tahap penyelesaian, sedangkan sembilan proyek masih ditender. Perkembangan ini terhitung signifikan karena pada umumnya proyek infrastruktur di Indonesia tertunda karena terkendala persoalan teknis mulai dari perizinan hingga pembebasan lahan.

Tidak pelak, kemajuan ini mendapat respon positif bagi masyarakat internasional menyusul membesarnya ekspektasi bahwa akan terjadi perubahan drastis dalam penyediaan fasilitas penunjang perekonomian. World Economic Forum (WEF) tahun ini mengganjar kenaikan indeks infrastruktur transportasi Indonesia, dari posisi 36 menjadi 30 (lihat tabel 2).

NEGARA	2016-2017	2017-2018	PERUBAHAN
Singapura	1	2	Naik 1
Malaysia	14	22	Turun 3
Indonesia	30	36	Naik 6
Thailand	34	37	Naik 3
Brunei	63	70	Naik 7
Vietnam	64	63	Turun 1
Filipina	90	90	-----
Kamboja	108	102	Turun 6
Laos	109	110	Turun 1

Sumber : World Economic Forum (WEF)

BAB 1

Ambisi Infrastruktur Himpit Raksasa Negeri

Tidak berhenti sampai di situ, Jokowi melanjutkan ambisi itu tahun ini dengan menetapkan beberapa target infrastruktur yang tergolong ambisius. Anggaran infrastruktur pun dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun pada tahun ini. Setidaknya sembilan jenis proyek masuk dalam target pengembangan (lihat tabel 3).

Meski anggaran itu fantastis, mengutip Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, mengingatkan bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur di luar APBN jauh lebih besar dari itu. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 nilainya mencapai Rp 4.700 triliun.

TARGET INFRASTRUKTUR 2018



Sumber : Kementerian keuangan

Ambisi Infrastruktur Himpit Raksasa Negeri

Sejauh ini, menurut estimasi, APBN diprediksi menyumbang 41,3% dari kebutuhan tersebut, atau senilai Rp 1.941 triliun. Sementara, BUMN ditargetkan menyumbang 22% atau Rp 1.034 triliun, diikuti swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp 1.725 triliun. Beberapa inovasi pendanaan pun dilakukan, misalnya lewat Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), melengkapi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Melalui program PINA, PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Taspem menyeteror Rp 3,5 triliun ke PT Waskita Toll Road untuk melengkapi kebutuhan ekuitasnya. Waskita Toll Road saat ini memegang konsesi 15 ruas jalan tol, delapan di antaranya di Jawa sepanjang 408,41 kilometer sedangkan lima lainnya merupakan ruas tol Trans Jawa sepanjang 305,27 km.

Hanya saja, yang kurang diperhitungkan pemerintah adalah inovasi tersebut mengalihkan beban pendanaan ke BUMN, sehingga banyak di antaranya memikul beban keuangan dalam neraca keuangan, sehingga memicu turunnya saham-saham BUMN karya akhir-akhir ini, meski kesemuanya membukukan kenaikan laba bersih.

PT Waskita Karya Tbk membelanjakan kas sebesar Rp 16,55 triliun kepada mitra ketiganya terkait proyek-proyek yang sedang ditangani, jauh lebih tinggi dari kas yang masuk senilai Rp 14,24 triliun (lihat tabel 4). Di sisi lain, PT Wijaya Karya Tbk melakukan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 11,5 triliun. PT Adhi Karya Tbk membelanjakan kas hingga Rp 9,9 triliun.

PERUSAHAAN	ARUS KAS (Rp)	KEWAJIBAN (Rp)	EKUITAS (Rp)	DER (X)
WASKITA KARYA	- 2,9 triliun	74,79 triliun	12,89 triliun	2,89
ADHI KARYA	- 812,26 miliar	18,89 triliun	5,54 triliun	1,4
WIJAYA KARYA	- 860,99 miliar	28,26 triliun	11,79 triliun	0,74

Sumber : Laporan Keuangan

Dengan profil keuangan demikian, pemerintah perlu mengurangi tekanannya terhadap BUMN karya agar tidak mengancam going concern keempat BUMN karya tersebut. Inovasi pendanaan lain bisa dilakukan, misalnya dengan mengikuti Amerika Serikat (AS) yang membentuk Highway Trust Fund (Dana Amanah Jalan Raya).

Konsepnya, para pembeli bahan bakar minyak (BBM) diasumsikan adalah pengguna jalan, sehingga mereka dikenakan kutipan senilai 18,4 sen dolar AS (Rp 2.400) per galon bensin dan 24,4 sen dolar AS per galon solar. Dana yang dipungut sejak tahun 1956 ini dikelola perusahaan pengelola investasi untuk membangun dan merawat jalan raya non tol.

Pemerintah bisa saja menerapkan konsep serupa, untuk menggali dana tambahan pembangunan proyek jalan raya non tol atau proyek non-komersial. Jika diasumsikan tiap liter BBM dikenakan kutipan senilai Rp 100 dengan penjualan BBM sebanyak 32 juta kiloliter (mengacu capaian pada semester 1/2017), maka dalam enam bulan pertama tahun ini saja bisa terkumpul dana Rp 3,2 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk membangun jalan raya di Papua, di daerah perbatasan, dan daerah terluar di Indonesia.

Ini akan sangat membantu Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalokasikan dana yang ada ke proyek infrastruktur lainnya yang lebih strategis. Ini tentu saja dengan catatan bahwa DPR, yang telah dikuasai kubu PDIP, meloloskan rencana tersebut.***

Pada tahun 1974, Amerika Serikat (AS) pernah terjebak dalam sebuah—mengutip *The Washington Post*—“blunder besar kampanye publik” dalam upayanya mengendalikan inflasi tinggi. Sebagaimana awam dipahami, inflasi adalah upeti senyap yang menggerogoti nilai pendapatan rakyat di sebuah negara.

Inflasi adalah “musuh publik nomor wahid”, demikian Presiden AS Gerald Ford menegaskan dalam pidatonya di depan kongres saat itu. Kala itu, Ford yang baru terpilih dihadapkan pada problem inflasi tinggi, sebesar 12,3%, akibat krisis minyak pada 1973.

Didukung partai Republik, Ford memilih memerangi inflasi bukan dengan mengintervensi barang yang pergerakan harganya diatur pemerintah (administered price), melainkan dengan mengajak masyarakat melakukan hal-hal kecil seperti menanam sayur-mayur, berbagi pakai kendaraan, dan mengecilkan penyejuk udara/penghangat ruangan.

Warga pun diserukan memakai pin bertuliskan WIN: *Whip inflation Now!* yang tentu saja berakhir sebagai lelucon. Dalam beberapa bulan, pin tersebut hilang dari ruang-ruang publik. Alan Greenspan, yang saat itu mengetuai Dewan Penasihat Ekonomi Ford dalam salah satu buku yang diterbitkannya belakangan mengakui kalau konsep itu “sebenarnya memang benar-benar bodoh.”

Sebagai gantinya, Ford pada Maret 1975 mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak (WP) pribadi. Selain itu, dia akhirnya setuju mendongkrak belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) AS. Dampaknya, ekonomi AS membaik setahun kemudian, dengan tingkat inflasi terpangkas menjadi 4,8%. Berkat dua kebijakan itu, Ford sukses membawa AS keluar dari jurang stagflasi (inflasi tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan).

Di Indonesia, di mana 65 juta jiwa—mengutip laporan Bank Dunia—berada di tubir garis kemiskinan, tim ekonomi Presiden Jokowi sedang getol memerangi inflasi meski mesin ekonomi masih sehat-sehat saja dengan pertumbuhan sekitar 5%. Maklum saja, kenaikan inflasi pada harga bahan pokok, terutama beras, berpotensi melempar jutaan jiwa itu ke jurang kemiskinan.

Namun di tengah perang besar melawan inflasi, pemerintah kali ini berpotensi mengorbankan kesejahteraan petani dengan nekad melakukan impor beras meski mendekati panen raya. Layakkah sektor pertanian ini “dikorbankan” untuk mengendalikan inflasi dan menekan angka kemiskinan? Jawabannya tergantung pada seberapa penting apa arti 16% pemilih aktif dalam Pilpres, yang kini hidup dari sektor pertanian, bagi mesin politik Jokowi.***

Harga Mahal Perang Melawan Inflasi

Pada masa damai, musuh negara yang paling utama—karena bisa menyerang sewaktu-waktu, memukul semua lapisan masyarakat dan memicu kemiskinan—adalah inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen (IHK). Inflasi yang merupakan rerata kenaikan harga-harga barang utama ini membuat nilai riil uang di tangan kita tergerus, kalah oleh harga-harga barang yang kian mahal.

Di sisi lain, bagi pemerintah, inflasi mendongkrak beban pembayaran bunga utang karena tiap kenaikan inflasi secara otomatis dibarengi kenaikan suku bunga utang di pasar keuangan. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tiap kenaikan 1% suku bunga surat utang negara (SUN) akan memicu tambahan *real cost* senilai Rp 300 miliar berupa kenaikan pembayaran bunga utang.

Karenanya, tidak heran jika pemerintah kini mati-matian memerangi inflasi dengan melancarkan lima jurus (lihat tabel 1). Setelah sukses melepas keterkaitan erat inflasi Indonesia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tantangan selanjutnya dalam perang melawan inflasi adalah mengatasi problem kenaikan harga barang karena kenaikan harga produksi (*cost push inflation*).

LIMA STRATEGI MELAWAN INFLASI

1 Menjaga harga makanan yang bergejolak (*volatile food*) ke kisaran 4 sampai 5 persen



Memperkuat infrastruktur untuk logistik makanan di daerah, terutama di pergudangan dan penyimpanan



Mengembangkan sistem data aliran komoditas, terutama makanan



Memanfaatkan instrumen fiskal dan insentif untuk memperpanjang peran pemerintah lokal dalam mengendalikan harga



Mendorong diversifikasi konsumsi makanan, terutama cabai segar dan bawang dengan mendorong inovasi produk di industri makanan olahan



Memperkuat kerja sama antar daerah



Mempercepat konektivitas pembangunan infrastruktur



Memperbaiki pola tanam

2

Menekan efek lanjutan penyesuaian harga yang diatur pemerintah, misalnya mengendalikan tarif transportasi



3

Memperkenalkan lebih banyak komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) termasuk rencana konversi beberapa subsidi langsung menjadi cash transfer (pupuk, raskin, dan elpiji 3 kg).



4

Membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) nasional dan TPI daerah (TPID), serta memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah melalui rapat koordinasi

5

Memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi makro

Sumber : : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(21)

Harga Mahal Perang Melawan Inflasi

Dari kelima strategi tersebut, strategi ketiga merupakan yang paling agresif dilakukan pemerintah sekarang, yakni memperluas cakupan harga barang yang diatur pemerintah (*administered price*). Upaya tersebut sejalan dengan fakta bahwa komoditas *administered price* pada tahun 2014 menjadi penyumbang terbesar inflasi (lihat tabel 2).

Bahan yang harganya bergejolak (*volatile*) pun masuk ke dalam target, yakni beras. Dalam sepanjang sejarah Indonesia, menurut catatan CNBC Indonesia, hanya pemerintahan Jokowi lah yang menerapkan batas atas (*ceiling price*) untuk beras. Kebijakan berbeda ini diambil karena harga beras (makanan pokok bagi sekitar 250 juta masyarakat Indonesia) memang sangat memengaruhi angka kemiskinan.

	INFLASI				AKTIF			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Harga diatur Pemerintah	17,57	0,39	0,21	8,7	1,22	0,18	0,19	0,18
Bergejolak	10,88	4,84	5,92	0,71	0,64	0,65	0,1	0,45
Inti	4,93	3,95	3,07	2,95	0,6	0,13	0,13	0,08
Umum (IHK/inflasi)	8,36	3,35	3,02	3,61	2,46	0,96	0,42	0,71

Sumber : BPS

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penduduk miskin di Indonesia sangat rentan kenaikan harga, khususnya makanan. Setiap kenaikan harga beras sebesar 10%, jumlah orang miskin akan bertambah 1,2 juta orang. Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73,19% dengan beras menjadi kontributor utamanya dengan andil sebesar 21,8% terhadap garis kemiskinan.

Harga eceran tertinggi (HET) tersebut mulai diberlakukan efektif pada 1 September 2017, baik di pasar ritel modern maupun pasar tradisional (lihat tabel 3). Meski sempat ditolak oleh asosiasi pedagang beras, kebijakan ini tetap diberlakukan demi menekan volatilitas harga beras agar tidak terlalu besar menekan inflasi.

BAB 2

Harga Mahal Perang Melawan Inflasi



Sumber : Permendag No. 57/M-Dag/Per/8/82017 tentang Penetapan Harga HET Beras

Jika dicermati, batas atas harga beras tersebut tidak banyak berubah dibandingkan dengan posisi harga pada Desember 2014 pada Rp 9.500 per kilogram (kg), yang merupakan lonjakan pertama harga beras pada era Jokowi, dari posisi sebelumnya Rp 7.300/kg. Hanya saja, di lapangan harga beras masih berkisar di atas harga acuan tersebut (lihat tabel 4).

RERATA HARGA BERAS MEDIUM



Sumber : Kemendag

Harga Mahal Perang Melawan Inflasi

Tidak cukup sampai di situ, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam, Thailand, Pakistan dan India. Sebanyak delapan pemasok beras dijadwalkan mengirim 346.000 ton hingga Februari. Mengutip keterangan Kemendag, hingga 17 Januari 2018, stok beras kewajiban pelayanan publik (*public service obligation/ PSO*) Bulog volumenya mencapai 854.947 ton sehingga sisa stok per 31 Maret 2018 diperkirakan hanya 142.029 ton.

Kemendag dan Kementan memang kompak berjanji bahwa impor beras kali ini takkan mengganggu penyerapan beras lokal meski impor itu pada kenyataannya dilakukan menjelang masa panen raya pada Februari. Namun seperti biasa, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tambahan stok itu tidak akan merembes ke pasar dan mendistorsi harga jual gabah petani.

Jika sebelumnya petani bisa menyasiasi dilema-dilema semacam ini dengan menjual produk mereka ke perusahaan swasta pengolah beras yang menawarkan harga beli tinggi, kali ini opsi itu tidak ada lagi karena pemerintah telah menutup celah untuk itu lewat kebijakan harga batas atas. Kriminalisasi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk karena menyerap beras yang—menurut pemerintah—ditanam dengan dana subsidi menjadi peringatan keras bagi perusahaan swasta lain agar tak mengulang praktik serupa.

Impor beras kali ini benar-benar menjadi pertarungan bagi pemerintahan Jokowi untuk menjaga popularitasnya di kalangan petani. Jika impor beras kali ini terbukti membuat harga beli beras petani anjlok, ini akan menjadi pukulan telak bagi presiden yang sempat berkampanye untuk “memuliakan petani dengan tidak akan mengimpor beras”.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian mencapai 31,7 juta (2013). Angka itu cukup signifikan dalam skala politik. Dengan asumsi jumlah mereka yang bekerja di sektor tersebut tidak berubah, angka ini setara dengan 16,1% pemilih Pemilu 2019 yang jumlahnya mencapai 196,5 juta.***

Konsolidasi Penggajian & Turunnya “Daya Beli”

Di Jakarta, misalnya, tingkat pengupahan pada 2016-2018 naik rata-rata hanya 10,74% dengan fluktuasi yang terbatas, atau jauh dibandingkan dengan kondisi tiga tahun sebelum PP Pengupahan yang baru itu dijalankan. Pada 2013-2015, tingkat pengupahan naik 21,81% dengan volatilitas yang sangat tajam. Pada 2012, misalnya ketika Ibu Kota dipimpin oleh Jokowi, upah buruh naik hingga 43,87%, dan diikuti kenaikan 2 tahun berikutnya berturut-turut di kisaran 10%.

Menyusul sistem pengupahan baru tersebut, pemerintah melaporkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sejak 2015 hingga Juni 2017 (lihat tabel 2). Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) sempat naik 6,18% pada Agustus 2015, angka pengangguran terkendali ke 5,5% (Agustus 2017), membaik dari posisi Agustus 2014 (5,94%).

PENYERAPAN TENAGA KERJA (2015-SEMESTER I 2017)



Sumber : BKPM

Konsolidasi Penggajian & Turunnya “Daya Beli”

Namun, ada fenomena yang patut dicermati di sini karena kenaikan penyerapan tenaga kerja tersebut justru kemudian diikuti penurunan konsumsi. Tahun lalu, publik Indonesia diramaikan oleh polemik terutama di media sosial mengenai penurunan “daya beli” (*purchasing power*) masyarakat. Menurut kami, yang terjadi sebenarnya adalah penurunan ‘konsumsi’ rumah tangga, dan bukannya penurunan daya beli, karena inflasi (yang merupakan faktor utama penggerus daya beli) sebenarnya masih terjaga di era Jokowi.

Jika merunut data BPS, daya beli masyarakat secara umum masih terjaga, kecuali untuk buruh bangunan dan petani. Pada Juli 2017, upah buruh bangunan tergerus 0,1% menjadi Rp 64.747 per hari karena kenaikan upahnya kalah tinggi dibandingkan dengan kenaikan inflasi. Demikian juga dengan upah riil buruh tani yang hanya mengalami kenaikan daya beli sebesar 0,03% (karena inflasi naik 0,18% atau lebih tinggi dari upah riil mereka yang hanya naik 0,15%).

Sementara itu, indikasi penurunan konsumsi publik terlihat dari melemahnya penjualan ritel, seperti yang dikeluhkan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Pada Agustus tahun lalu, Aprindo melaporkan penjualan anggotanya turun 5%-15% untuk pakaian jadi, sementara penjualan ritel makanan dan minuman (mamin) bervariasi dengan penurunan hingga 10%. Melemahnya konsumsi publik juga diindikasikan dengan terus menurunnya pertumbuhan penjualan barang dengan perputaran cepat (*fast moving consumer goods*) sejak kuartal I-2016 (lihat tabel 3).

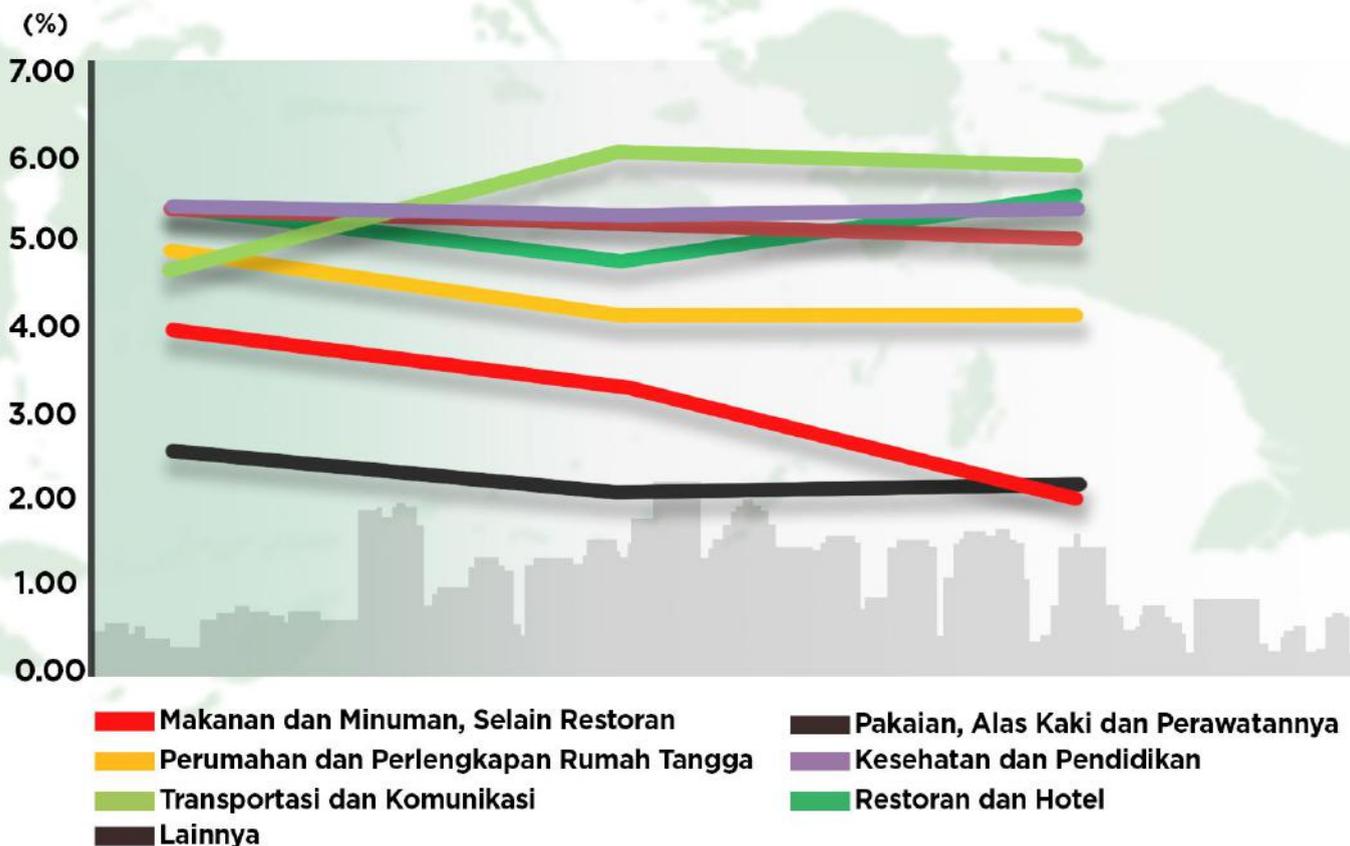


Sumber : Nielsen

Konsolidasi Penggajian & Turunnya “Daya Beli”

Jika dirunut dari sisi komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) dalam tiga tahun terakhir (lihat tabel 3), terlihat bahwa ada perlambatan belanja di pos ‘pengeluaran konsumsi rumah tangga’ terutama pada pos ‘mamin non restoran’ dan ‘pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya’. Kedua pos tersebut umumnya menguat ketika masyarakat menengah ke bawah (dalam hal ini buruh) mendapat tambahan pendapatan.

PERTUMBUHAN PDB SEKTOR KONSUMSI RUMAH TANGGA 2014-2017



Apakah pemicunya adalah sistem pengupahan yang baru? Nielsen secara tidak langsung mengonfirmasi itu dengan menyebutkan bahwa “turunnya *take home pay* (total upah yang diterima pekerja) menjadi pemicu utama penurunan konsumsi”, sementara secara bersamaan terjadi kenaikan “biaya hidup”.

Konsolidasi Penggajian & Turunnya “Daya Beli”

Nielsen tidak mendetilkan biaya hidup yang naik tersebut, tetapi secara kasat mata publik menyaksikan kenaikan tarif listrik yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pemerintah menaikkan tarif listrik sebanyak empat kali pada Juni, Juli, Oktober, dan Desember dengan total kenaikan 23%. Selanjutnya pada 2017, tarif listrik juga naik sebanyak tiga kali yakni pada Januari, Maret, dan Mei.

TARIF LISTRIK 900 VA NON-SUBSIDI



Sumber : PLN

Untuk mengatasi persoalan turunnya “daya beli” masyarakat menengah, Jokowi terlihat mengikuti langkah yang diambil Presiden Ronald Reagan untuk mengatasi kelesuan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada tahun 1981, yakni: turunkan pajak. Pemerintah telah menaikkan batas pendapatan yang tidak kena pajak (PTKP) yang artinya membebaskan pajak penghasilan (Pph) kepada lebih banyak pekerja. Jika semula mereka yang berpenghasilan di atas Rp 36 juta per tahun terkena pajak, maka kini hanya yang berpenghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun yang dipajaki.

Konsolidasi Penggajian & Turunnya “Daya Beli”

Kebijakan ini secara teoritis efektif untuk meredam skala penurunan konsumsi (dan juga daya beli) masyarakat karena negara memberikan “ruang fiskal” lebih besar kepada masyarakat untuk berbelanja. Bagi pemerintah, kebijakan ini memang mengurangi penerimaan PPh, tapi secara bersamaan mendorong penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan PPh 22 Impor ketika belanja publik bergairah lagi.

Sementara itu, untuk mendorong “daya beli” masyarakat bawah, terutama di desa, maka dana desa yang saat ini digencarkan semestinya bisa menjadi solusi, dengan catatan pembelanjanya benar-benar sesuai peruntukan yakni membangun infrastruktur dan pengembangan kapasitas desa.

Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kenaikan batas PTKP berhenti sampai Rp 54 juta dan tidak dinaikkan lebih jauh? Bukankah konsumsi rumah tangga menyumbang separuh lebih PDB setiap tahunnya?***

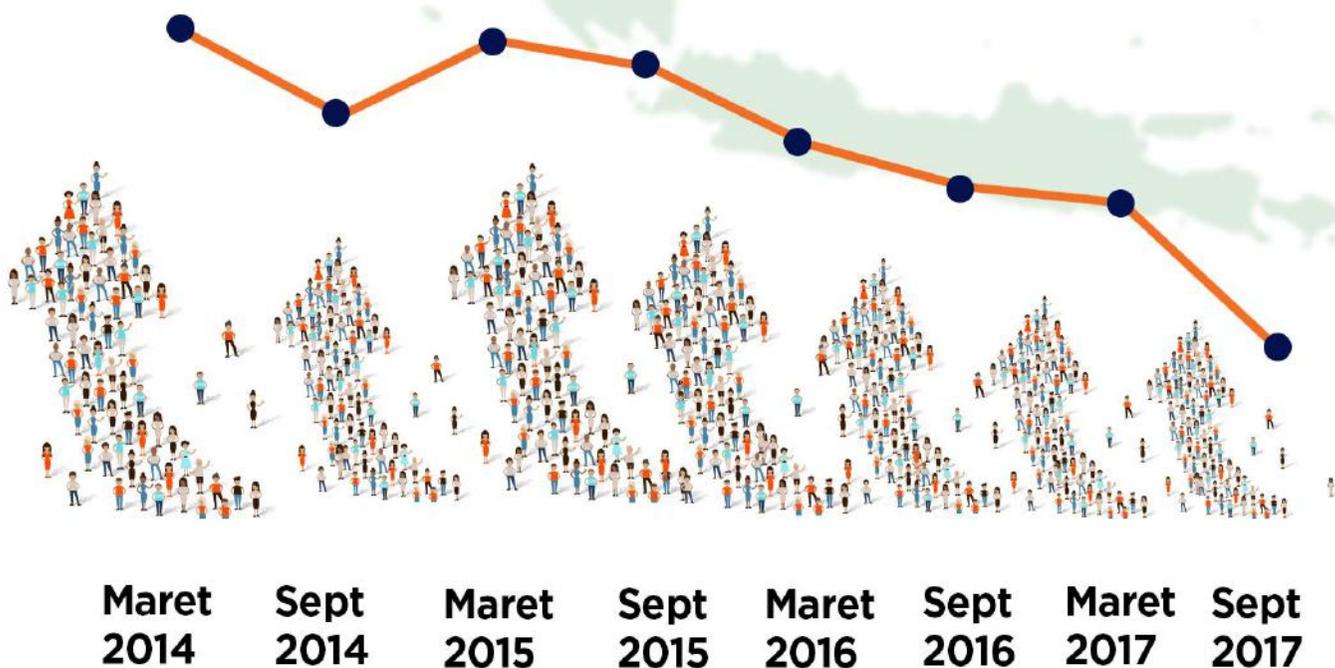
BAB 2

Antara Kemiskinan, Wisata, dan Literasi Keuangan

Presiden Jokowi mewarisi pemerintahan dengan pekerjaan besar mengentaskan kemiskinan. Saat dia menjabat, angka kemiskinan Indonesia berada di level 11%, atau tepatnya 10,96%, sebanyak 26,58 juta orang (September 2014). Artinya, satu dari setiap sepuluh orang Indonesia adalah warga miskin.

Setelah tiga tahun menjalankan roda pemerintahan, angka kemiskinan berhasil ditekan ke level 10,12% (September 2017). Itu merupakan angka kemiskinan terendah sejak krisis 1997, dan bahkan lebih rendah dari angka kemiskinan ketika Indonesia menjadi “Macan Asia” pada 1996. Ini jelas merupakan pencapaian signifikan karena pada kurun waktu yang sama jumlah penduduk Indonesia bertambah 7 juta dari 255 juta jiwa (2014) menjadi 262 juta jiwa (2017).

ANGKA KEMISKINAN



Jika ditelisik secara mendetil, pertumbuhan tertinggi penduduk miskin masih berada di perdesaan, utamanya di luar Jawa. Sepanjang masa pemerintahan Jokowi (2015-2017), provinsi yang mencatatkan pertumbuhan warga miskin tertinggi berada di kawasan Indonesia Tengah, yakni Kalimantan Utara sebanyak 22,35%. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, yang secara administratif baru berdiri pada 2012, dan juga merupakan provinsi yang membawahi wilayah-wilayah terluar di bagian Utara Indonesia.

Sebaliknya, pertumbuhan terendah jumlah penduduk miskin terjadi di kawasan Barat Indonesia, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi yang terkenal dengan wisata budayanya itu mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar -15,25%, terpaut paling jauh dari rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin nasional pada periode yang sama (-7,03%).

Jika dilihat berdasarkan cakupan wilayah lokasi kemiskinan, provinsi tersebut juga mencatat penurunan angka kemiskinan yang terbesar di wilayah perdesaan, yakni sebesar -23,86%. Salah satu faktor penting yang patut disorot di sini adalah adanya program pembagian dana produktif senilai Rp1 juta per kepala keluarga miskin. Selain itu, provinsi ini juga mengembangkan destinasi wisata baru yang “instagramable”, di setidaknya 200 lokasi yang sebagian besar berlokasi di perdesaan, sehingga membantu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mempercepat laju ekonomi kreatif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi ini. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) saja—yang memasuki bandara Adi Soetjipto Yogyakarta, dan belum memasukkan jumlah wisatawan domestik—telah meroket 45,76% dalam tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi, dari 89.156 per akhir 2014, menjadi 129.951 per November 2017. Angka terbaru ini berpotensi naik karena belum memasukkan kunjungan wisman per Desember 2017.

PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISMAN DI DIY



Sebaliknya, provinsi dengan kenaikan jumlah penduduk miskin perdesaan terbesar terjadi di Papua, yakni sebesar 5,78%. Fakta ini dikonfirmasi dengan pemberitaan akhir-akhir ini mengenai meninggalnya 61 anak suku Asmat, yang tinggal di provinsi tersebut, karena gizi buruk dan komplikasi beberapa penyakit. Faktor infrastruktur masih menjadi kendala utama program ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Bagaimana dengan angka kemiskinan perkotaan? Bali tercatat jadi daerah dengan pengurangan penduduk miskin kota paling signifikan sepanjang pemerintahan Jokowi, yakni -12,02%, sedangkan Kalimantan Tenggara (Sultra) mencatat pertumbuhan penduduk miskin kota terbesar, mencapai 67,13%.

Antara Kemiskinan, Wisata, dan Literasi Keuangan

Berdasarkan data ini, bisa dilihat bahwa industri pariwisata cukup efektif mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang tengah didorong oleh pemerintah menyusul tren kenaikan wisata perjalanan di kalangan generasi millennial. Bali dan Yogyakarta membuktikan itu.

Secara bersamaan, ketimpangan pendapatan menyempit menyusul membaiknya rasio Gini (rasio yang dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan, di mana rasio yang kecil menunjukkan ketimpangan yang kian mengecil juga). Ketimpangan di perkotaan dan di perdesaan tercatat semakin menurun.

RASIO GINI

PERIODE	KOTA	DESA	TOTAL
Sept 2014	0,433	0,336	0,414
Maret 2015	0,428	0,334	0,408
Sept 2015	0,419	0,329	0,402
Maret 2016	0,41	0,327	0,397
Sept 2016	0,409	0,316	0,394
Maret 2017	0,407	0,32	0,393

Sumber : Kantor Staf Presiden

Hanya saja, Oxfam Indonesia dan the International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dalam laporan terbarunya yang dirilis Februari 2017, Indonesia menjadi negara terburuk keenam dalam hal kesenjangan pendapatan. Nilai kekayaan empat konglomerat terkaya setara dengan kekayaan 100 juta orang Indonesia.

Sementara itu, perusahaan keuangan global Credit Suisse, dalam salah satu laporan risetnya menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara keempat di dunia yang paling tidak merata secara ekonomi—setelah Rusia, India, dan Thailand—dengan tingkat disparitas sebesar 49,3%. Artinya, 1% orang terkaya Indonesia menguasai hampir separuh (49,3%) dari aset yang ada di negeri ini.

Salah satu simpul persoalannya, menurut Credit Suisse dalam laporan berjudul 'Global Wealth Databook 2017', aset non-finansial memiliki porsi signifikan membentuk kesenjangan aset di negara berkembang seperti India dan Indonesia. Aset non-finansial yang dimaksud umumnya adalah aset tak bergerak seperti tanah dan lahan agrikultur (perkebunan dan pertanian), karena aset finansial belum banyak menyentuh masyarakat menengah bawah.

Sebaliknya, dalam kasus China yang relatif lebih berhasil dalam hal pemerataan aset nasional, porsi aset tak bergerak kurang dominan dalam membentuk kesenjangan di negara komunis tersebut. Sebaliknya, akumulasi masyarakat atas aset finansial terus melonjak sehingga mengurangi kesenjangan penguasaan aset di negara tersebut. Adalah jamak di China bahwa transaksi saham di negara tersebut digerakkan oleh investor ritel, yang porsinya mencapai 80% dari porsi transaksi hariannya.

Penjelasan terakhir semestinya menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi, yakni melakukan revolusi struktur masyarakat, agar melakukan lompatan dalam hal literasi keuangan. Dengan memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal, baik dalam hal investasi maupun pembelian produk jasa keuangan lain, makin besar pula peluang bagi mereka menguasai lebih banyak aset finansial, dan meminimalisir kesenjangan aset di negeri ini.***

Neil Howe dan William Strauss, duo sejarawan Amerika Serikat (AS), tidak pernah terpikir bahwa istilah ‘millennial’ yang mereka tulis pada 1991 akan berada di pusat pusan studi budaya dan ekonomi dunia beberapa dekade kemudian. Kala itu, istilah tersebut muncul di buku mereka untuk menjelaskan generasi yang lahir pada tahun 1980-2000 (generasi Y), atau menjelang era milenium.

Bahkan ketika Neil meninggal pada 2007, istilah tersebut belum banyak diulas dalam diskursus sosial, ekonomi maupun budaya. Data mesin pencari google trend menyebutkan pencarian istilah ‘millennial’ baru memuncak pada 2013, dan terus naik sampai sekarang setelah revolusi digital mengumpulkan mereka ke dalam kolam pasar baru yang memiliki perilaku konsumsi berbeda dari generasi sebelumnya.

Dalam laporan berjudul ‘Millennials and Wealth Management’, perusahaan konsultan global Deloitte menyebutkan bahwa kaum milenial akan membentuk pasar baru berdaya beli kuat dalam dua tahun ke depan. Hingga 2020, nilai aset bersih milenial global diprediksi naik dua kali lipat dibandingkan dengan 2015, ke kisaran US\$ 19 triliun-US\$ 24 triliun.

Sepuluh lebih (54%) milenial di negara maju tercatat telah menyusun rencana bisnis mereka sendiri, dan 27% di antaranya telah berwirausaha. Secara bersamaan, dua pertiga klien perusahaan pengelola aset global telah berusia 60 tahun, sehingga membuka peluang akan ada aliran dana warisan besar dari generasi *baby boomers* ke generasi milenial.

Di tengah gelombang baru itu, Indonesia diestimasi meraih limpahan generasi milenial yang masuk bursa kerja dalam masa pemerintahan Jokowi, dan terus memuncak membentuk bonus demografi pada 2020 hingga 2035.

Secara bersamaan, revolusi digital yang merupakan pembentuk perilaku konsumsi generasi milenial berkembang pesat, melampaui kemampuan pemerintah menyiapkan regulasi. E-commerce, e-payment, dan *sharing economy* menciptakan disrupsi terhadap perekonomian nasional.

Pada tahap awal, disrupsi menjadi keniscayaan karena revolusi digital mendekonstruksi lanskap produksi, jasa, hingga rantai pasokan konvensional. Namun pada tahap selanjutnya, dia menciptakan 'ekonomi milenial' berbasis digital yang tak terelakkan, membuka peluang bisnis bagi kaum milenial untuk menciptakan startup, menawarkan jasa berprinsip *sharing economy*, dan membelanjakan serta menginvestasikan dananya berbasis digital.

Untuk bisa menjaring peluang itu, pemerintah harus memberi ruang pertumbuhan dan sistem pendukung (baik dari permodalan, perizinan, maupun pasar) bagi gelombang baru perekonomian ini, dan bukannya menciptakan halangan regulasi dan disinsentif fiskal yang membunuh peluang industri ini menjadi traksi baru perekonomian. ***

Serbuan Milenial di Depan Mata

Proyeksi tentang bonus demografi telah diperhitungkan bertahun-tahun sebelumnya bahkan sebelum Presiden Jokowi berkuasa. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fenomena ini berlangsung mulai 2017-2019. Artinya, dalam dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi pada periode pertama ini, Indonesia mendapat limpahan tenaga kerja baru dari kalangan milenial dengan proporsi usia produktif mencapai 55,5%.

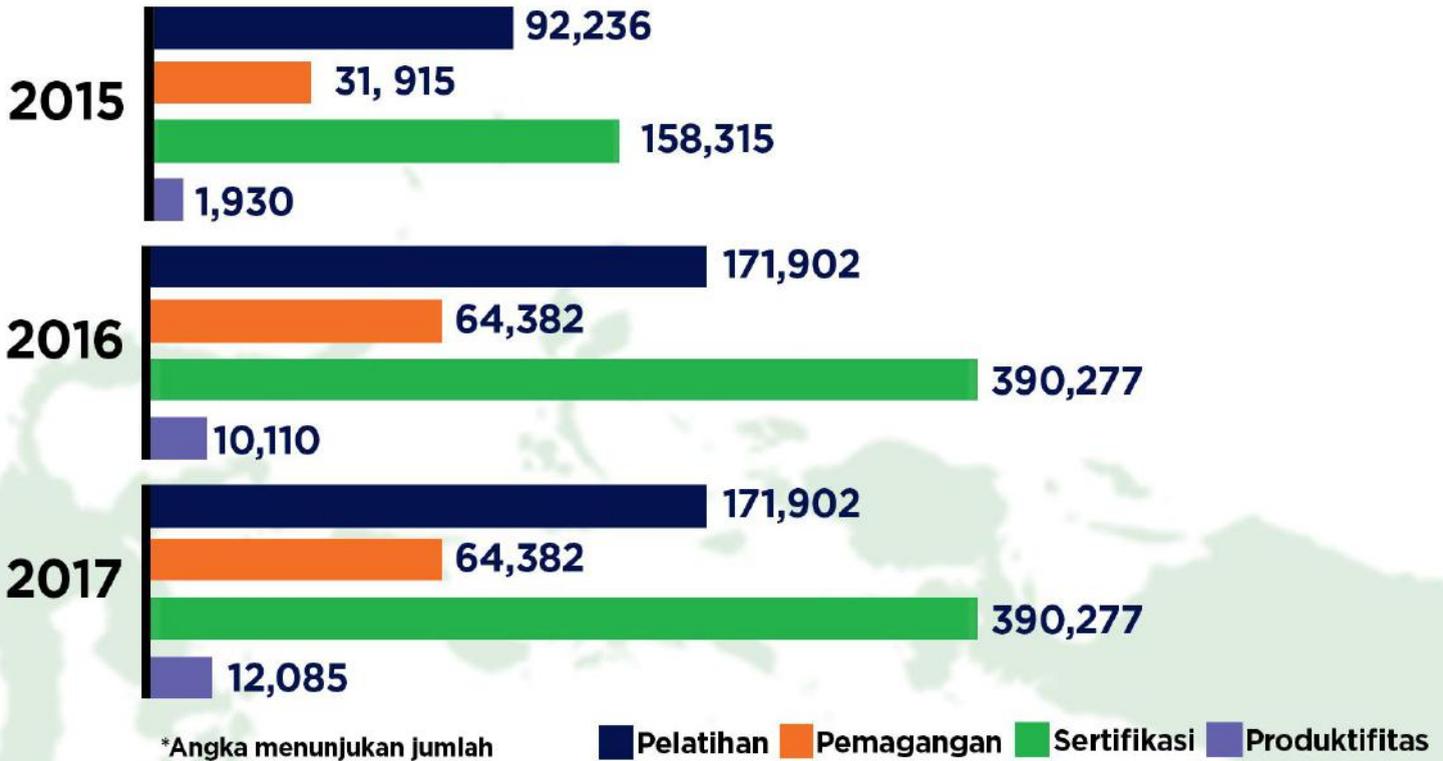
Seiring dengan kenaikan usia produktif, Indonesia menikmati berkah kenaikan kelas menengah. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan kelas menengah Indonesia pada 2016 tumbuh 174%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi di ASEAN, jauh dibandingkan pertumbuhan di Filipina sebesar 72%, Thailand (39%), Malaysia (18%), dan Singapura (10%).

Bagi pemerintahan Jokowi, situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena separuh konstituen pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 nantinya tergolong sebagai kaum milenial, yang identik dengan interaksi tinggi di dunia digital. Dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, kondisi ini menjadi keunggulan kompetitif karena Indonesia akan memiliki lebih banyak tenaga kerja usia muda yang kreatif dan melek digital. Secara bersamaan, mereka akan membentuk pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun untuk meraih keuntungan bonus demografi, menurut BKKBN ada empat prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, keberadaan pekerjaan produktif yang memungkinkan limpahan tenaga kerja baru tersebut untuk menabung. Kedua, tabungan itu diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif. Ketiga, ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum ke depan. Keempat, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja.

Guna mewujudkan kondisi pertama, pemerintah telah menerapkan strategi *link and match* untuk menyalurkan tenaga kerja terampil ke perusahaan lokal (lihat tabel 1). Program ini melibatkan 308 perusahaan, yang ditugaskan membina 1.035 sekolah menengah kejuruan (SMK). Targetnya adalah mencetak minimal 1 juta tenaga industri yang tersertifikasi.

Program *Link and Match* SMK-Industri



Sumber : Kementerian Tenaga Kerja

Namun, pertanyaan selanjutnya adalah perlukah kita mendorong aktivitas menabung (*saving*) di Indonesia sebagaimana direkomendasikan BKKN? Jawabannya, untuk kondisi sekarang sepertinya tidak. Sesuai dengan karakteristik generasi milenial yang — menurut studi Goldman Sachs — enggan memiliki aset fisik, condong pada *sharing economy*, dan gemar membeli produk jasa keuangan, akan ada limpahan pasar anak muda berdaya beli kuat yang dananya akan sia-sia bagi perekonomian jika berakhir menjadi tabungan di bank.

Pasalnya, Indonesia tengah menghadapi problem *bottleneck* pendanaan, di mana bank mengalami kelebihan likuiditas dengan nilai mencapai Rp 400 triliun. *Bottleneck* ini bisa muncul karena dua hal: perbankan yang terlalu hati-hati mengucurkan kredit, atau pelaku usaha yang lesu menggali dana ekspansi. Namun menurut hemat kami, faktor pertamalah yang kini terjadi. Muskyil untuk menyebut pelaku usaha sedang lesu menarik dana, mengingat pasar modal justru sedang mencatat kenaikan penggalan dana

Per November 2017, Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran pembiayaan instrumen non-bank yang tumbuh 24,1% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp276,5 triliun, sementara kredit perbankan hanya tumbuh 7,47% (yoy). Artinya, pelaku usaha pada 2017 masih mencari dana produktif. Posisi kelebihan likuiditas perbankan justru berpotensi menjadi beban bagi otoritas moneter, karena disimpan di berbagai fasilitas moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), di mana BI harus memberi bunga atas dana-dana menganggur tersebut.

Karenanya, kenaikan tabungan masyarakat jelas bukan kondisi ideal di tengah perekonomian yang dibayangi perlambatan konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu menarik kaum milenial mengalirkan dananya untuk berbelanja, atau berinvestasi dengan memberikan lebih banyak insentif untuk membeli reksa dana, asuransi, dana pensiun, atau saham.

Bagi Jokowi, kaum milenial bisa menjadi berkah bila mereka puas dengan ekonomi karena bisa berwirausaha atau memiliki kemerdekaan finansial. Sebaliknya, situasi ini bisa menjadi bumerang jika mereka berakhir sebagai pengangguran dan memilih wajah pemimpin baru yang dinilai lebih bisa membangun 'ekonomi milenial'.***

Presiden Joko Widodo (Jokowi) paham benar bahwa disrupsi digital sudah menerpa Indonesia. Secara terbuka, dia menyinggung topik itu dalam forum sarasehan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyebutnya sebagai tantangan revolusi industri keempat. Istilah revolusi industri keempat ini sendiri digaungkan oleh Klaus Schwab, pendiri dan *Executive Chairman World Economic Forum* (WEF).

Beberapa teknologi kunci dari Revolusi Industri 4.0 antara lain *artificial intelligence* (AI), interkoneksi internet/ *internet of things* (IoT), teknologi robotik mutakhir, augmented/virtual reality, dan 3D printing. Revolusi industri yang terbaru ini membawa internet kian dekat dengan keseharian konsumen per individu lewat IoT, tidak seperti sebelumnya yang hanya menjadi penghubung antara produsen dan distributor, serta konsumen skala besar.

Sebagai contoh, *e-commerce* kini memungkinkan semua produsen dan konsumen, terlepas dari besar-kecilnya skala bisnis mereka, memiliki jalur langsung bertransaksi dan menghapus rantai suplai yang panjang. Di Indonesia, *e-commerce* tumbuh sangat pesat hingga sempat dicurigai sebagai penyebab turunnya penjualan ritel di Indonesia, meski nilai pasarnya terhadap industri ritel sebenarnya masih kecil, berkisar 7% dari total ritel modern. Tingginya pertumbuhan industri ini terlihat dalam kurun waktu 2013-2016, dengan jumlah partisipan dari sisi pembeli yang naik nyaris dobel dan pemakaian uang elektronik yang makin marak (lihat tabel 1).

PERTUMBUHAN PEMBELI ONLINE



Sumber : eMarketeer

PERTUMBUHAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK 2016

LAYANAN	PENYEDIA	RESPONDEN (%)
	Bank Mandiri	43,8
	Bank BCA	39,1
	Telkomsel	29,1
	Go-Jek	27,1
	Bank CIMB Niaga	15,6
	LINE	15,6

Sumber : eMarketeer

Tidak heran, startup terus bertumbuhan. Jumlah startup di Indonesia saat ini mencapai 1.682 unit, membawa Indonesia ke peringkat keempat dunia di urutan negara yang paling banyak menelurkan startup. Amerika Serikat berada di peringkat pertama, disusul India dan Inggris (lihat tabel 2).

Tingginya jumlah startup tersebut mengundang minat para investor global untuk menanamkan dananya di Indonesia. Berdasarkan penelitian Google dan AT Kearney selama periode Januari-Agustus 2017, total nilai investasi yang masuk hampir mencapai US\$ 3 miliar. Sebanyak 94% di antaranya berasal dari investor China.

“Demokratisasi” Revolusi Industri 4.0

PERINGKAT NEGARA DARI SISI STARTUP 2017



1
AMERIKA
SERIKAT
28,736



2
INDIA
4,655



3
INGGRIS
2,958



4
INDONESIA
1,682



5
KANADA
1,526



6
JERMAN
1,277



7
SPANYOL
998



8
BRAZIL
901



9
PRANCIS
901



10
AUSTRALIA
848

Sumber : Startup Ranging

Berdasarkan data 4IR Country Readiness Index (CRI) yang dirilis oleh A.T. Kearney dan World Economic Forum, Indonesia dianggap sebagai negara kelima yang paling potensial menerapkan Revolusi Industri 4.0 di belakang Jepang, Korea Selatan, Singapura, China, dan Malaysia. Potensi ini tak lepas dari besarnya populasi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Indonesia mencatat kenaikan PDB per kapita sebesar 4,3 kali lipat dari US\$ 800 pada 2000 menjadi US\$ 3.300 pada 2015. Di tengah situasi demikian, 132 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet dan 33,5% di antaranya, mengutip Alvara Research Center, tergolong *heavy users* (dengan akses internet 3–6 jam sehari), sedangkan 13,5% adalah *addicted users* (akses internet > 7 jam sehari). Artinya, 44,2 juta pengguna internet di Indonesia adalah *heavy users* dan 17,8 juta lainnya adalah *addicted users*.

Melihat peluang ini, pemerintahan Jokowi telah berupaya membangun peta jalan (*roadmap*) e-commerce di Indonesia, dengan memasukkannya ke dalam salah satu dari 16 paket kebijakan ekonomi yang, sayangnya, sampai sekarang belum berujung pada titik terang. Padahal, sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pasar terbesar e-commerce dan juga menikmati berkah IoT.

Dari sisi produksi, Kementerian Perindustrian menyiapkan empat strategi untuk memenangi persaingan dalam revolusi industri digital 4.0: pertama, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus belajar dan meningkatkan keterampilannya untuk memahami penggunaan teknologi IoT atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi.

Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) sehingga mampu menembus pasar ekspor melalui program e-smart IKM. Ketiga, mendorong industri nasional menggunakan teknologi digital seperti *big data*, *autonomous robots*, *cybersecurity*, *cloud*, dan *augmented reality* untuk memperkuat efisiensi dan membukukan penghematan sekitar 12%-15%.

Terakhir, inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi tempat inkubasi bisnis berupa wirausaha berbasis teknologi yang dihasilkan dari beberapa technopark di beberapa wilayah seperti di Bandung (Bandung Techno Park), Denpasar (TohpaTI Center), Semarang (Incubator Business Center Semarang), Makassar (Makassar Techno Park - Rumah Software Indonesia), dan Batam (Pusat Desain Ponsel).

Program tersebut secara umum sudah sesuai dengan ekspektasi. Hanya saja, perlu upaya tambahan untuk mempercepat pengadaan infrastruktur digital di Indonesia, termasuk juga pemerataannya. Sederhananya, pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan broadband di Indonesia, agar tidak ketinggalan dengan negara lain di tengah revolusi industri keempat ini. Di titik ini, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga (lihat tabel 3).

PERBANDINGAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



*angka persen menunjukkan porsi investasi (%) terhadap PDB

Sumber : Gartner Forecast on Enterprise IT Spending dan A.T. Kearney

Problem ini juga disinggung Nielsen dalam survey terbarunya mengenai perilaku konsumsi berita di Indonesia. Masih terbatasnya infrastruktur broadband berujung pada lambatnya akses internet di Indonesia, sehingga membuat masyarakat masih memilih menjalani hidup dalam revolusi industri 3.0 (dan bukannya revolusi industri 4.0). Mayoritas responden, atau sebanyak 24%, menyatakan memilih televisi ketimbang kanal online dalam hal konten video karena tiga hal. Pertama, kecepatan internet yang masih lambat, biaya langganan data yang mahal, dan ketiadaan akses karena tidak punya *gadget* yang mendukung (lihat tabel 4).

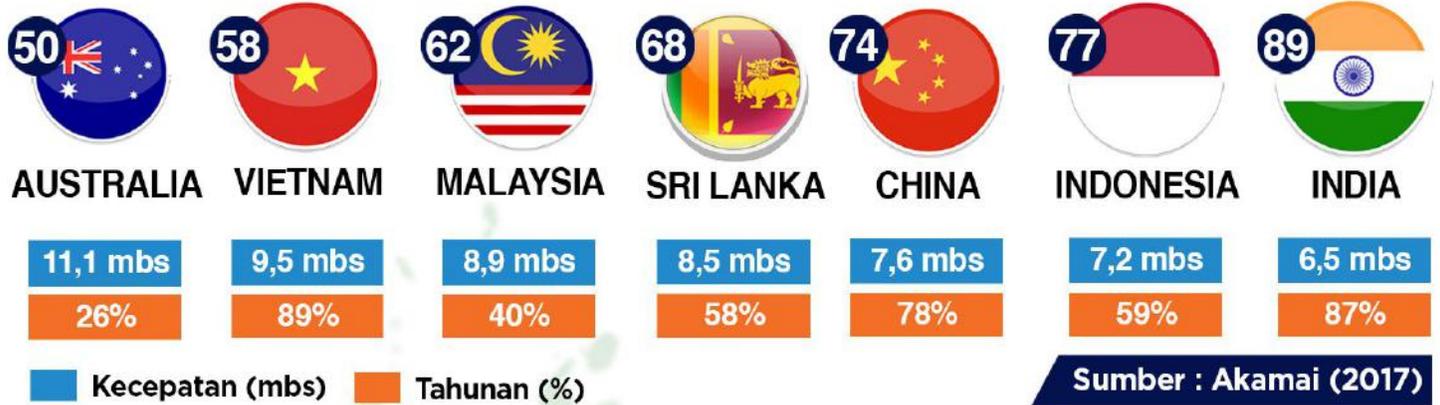
Lambatnya internet di Indonesia ini dikonfirmasi oleh Akamai, yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-77 di dunia, dalam hal kecepatan internet. Ini menempatkan Indonesia di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan bahkan Sri Langka. (lihat tabel 5)

PERINGKAT KECEPATAN INTERNET ASIA PASIFIK (Q1/2017)



BAB 3

“Demokratisasi” Revolusi Industri 4.0



Di sinilah pemerintah perlu memfokuskan perhatian dengan menciptakan “demokratisasi” habitat digital ke seluruh lapisan masyarakat, agar semua warga di seluruh Indonesia memiliki akses yang sama ke dunia digital. Selanjutnya, ketika berkah digital itu bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, dan juga pelaku industri (startup), maka saat itulah baru meninjau aspek fiskal.

Jangan dibalik, yakni menciptakan disinsentif bagi pasar yang sedang terbentuk itu lewat pengenaan bermacam-macam pajak demi mengejar pemasukan negara yang nilainya mungkin hanya cukup untuk membayar bunga utang dari satu atau dua kreditor saja. Sementara, dunia digital yang secara natural memberi andil bagi ekonomi nasional (berupa pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya aktivitas bisnis) dibiarkan layu sebelum berkembang.

Memang, pada awalnya disrupsi digital akan memangkas lapangan kerja konvensional. Sebanyak 5,1 juta pekerja, mengutip Ekonom Chatib Basri, berpotensi kehilangan pekerjaan. Namun, jutaan lapangan kerja lain dipastikan terbuka seperti yang kita lihat dari fenomena ojek online dan e-commerce. Tantangannya sekarang adalah: siapkah kita menyambut dan berselancar di atas ombak perubahan digital tersebut? ***

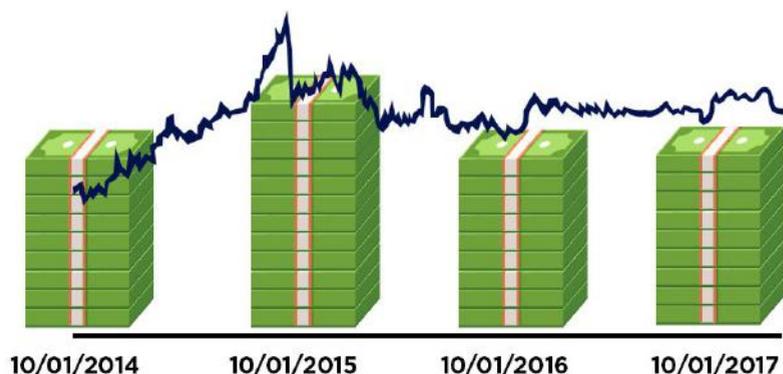
Indonesia telah sepenuhnya pulih dari krisis 1997 pada tahun lalu. Penanda simbolisnya terlihat dari diraihnya kembali peringkat layak investasi (*investment grade*) dari Standard and Poor's (S&P), melengkapi rating serupa yang diberikan dua perusahaan pemeringkat global lain yakni Moody's dan Fitch Ratings. Kini, kondisi moneter Indonesia pada pemerintahan Jokowi semakin kuat terlihat dari posisi cadangan devisa yang terus meningkat (lihat tabel 1).

CADANGAN DEvisa (US\$ MILIAR)



Hanya saja, ekspektasi pulihnya perekonomian Indonesia tidak serta-merta diikuti penguatan nilai tukar rupiah. Sebaliknya, kurs rupiah justru melemah 9,92% sepanjang pemerintahan Jokowi, dari kisaran Rp 12.100 menjadi Rp 13.300 per dolar AS (lihat grafik 2). Padahal, pada masa kampanye, para ekonom pendukung Jokowi yakin bahwa rupiah bakal menguat ke kisaran Rp 11.000 dan bahkan Rp 10.000 jika Jokowi terpilih.

NILAI TukAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS



Sumber : Reuters

Di tengah jaringan ekonomi global, ekonomi Indonesia mau tidak mau berkelindan dengan fluktuasi dan risiko perekonomian dunia. Kebijakan fiskal ekspansif di AS dipastikan mendorong peningkatan suku bunga acuan sehingga berpotensi memicu tekanan *capital flow*. Pemerintah sendiri telah memperkirakan sembilan faktor global yang harus diantisipasi terkait dengan itu (lihat tabel 3).

TABEL EKONOMI GLOBAL



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018)

Merawat Warisan Tahan Krisis

Sejarah menunjukkan bahwa ketika krisis 1997 melanda dan memukul banyak lembaga keuangan dan perusahaan korporasi di Indonesia, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) justru berhasil bertahan. Dalam Forum Ekonomi Islam Dunia (World Islamic Economic Forum), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peran UMKM dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menyelamatkan negara dari badai krisis.

Kesadaran ini dijaga betul oleh pemerintahan Jokowi dengan menggulirkan program kredit usaha rakyat (KUR), menyempurnakan program yang sudah dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menaikkan nilai alokasi KUR dan menurunkan suku bunganya (lihat tabel 4).

PERBANDINGAN PROGRAM KUR (Rp triliun)

TAHUN	NILAI	CAPAIAN (%)	TARGET	NPL (%)	RERATA SUKU BUNGA
2007 - 2014	178	—	—	3,3	19
2015	22,7	75,9	30	—	7,17
2016	94,4	94,4	100	0,37	8,83
2017	96,71	87,9	100	3,3	8,67

Sumber : Diolah Tim Riset CNBC Indonesia

Sejauh mana program KUR memengaruhi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja? Kita bisa melihat jejaknya dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDB. Menurut data Kementerian Keuangan, mayoritas pengucuran KUR tersebut diarahkan ke sektor perdagangan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (lihat tabel 5).

BAB 3

Merawat Warisan Tahan Krisis

PORSI KUCURAN KUR 2015		PORSI KUCURAN KUR 2016		PORSI KUCURAN KUR 2017 *	
SEKTOR		SEKTOR		SEKTOR	
	25,9		66,29		56
	55		17,36		23
	16		11,03		13
	2,4		4,1		6
	0,7		1,22		2
					0,1



* : Per 31 Juli 2017
Angka dalam %

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari keenam sektor tersebut, tiga di antaranya tercatat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (lihat tabel 6), bersama dengan kelompok usaha menengah dan besar.

LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA

2015			2016		
Jenis Pekerjaan	LAJU (%)	ANDIL (%)	Jenis Pekerjaan	LAJU (%)	ANDIL (%)
	4,25	0,92		4,29	0,92
	6,65	0,64		3,93	0,53
	4,02	0,53		5,22	0,51
	10,06	0,45		3,25	0,42
	2,47	0,34		8,87	0,42



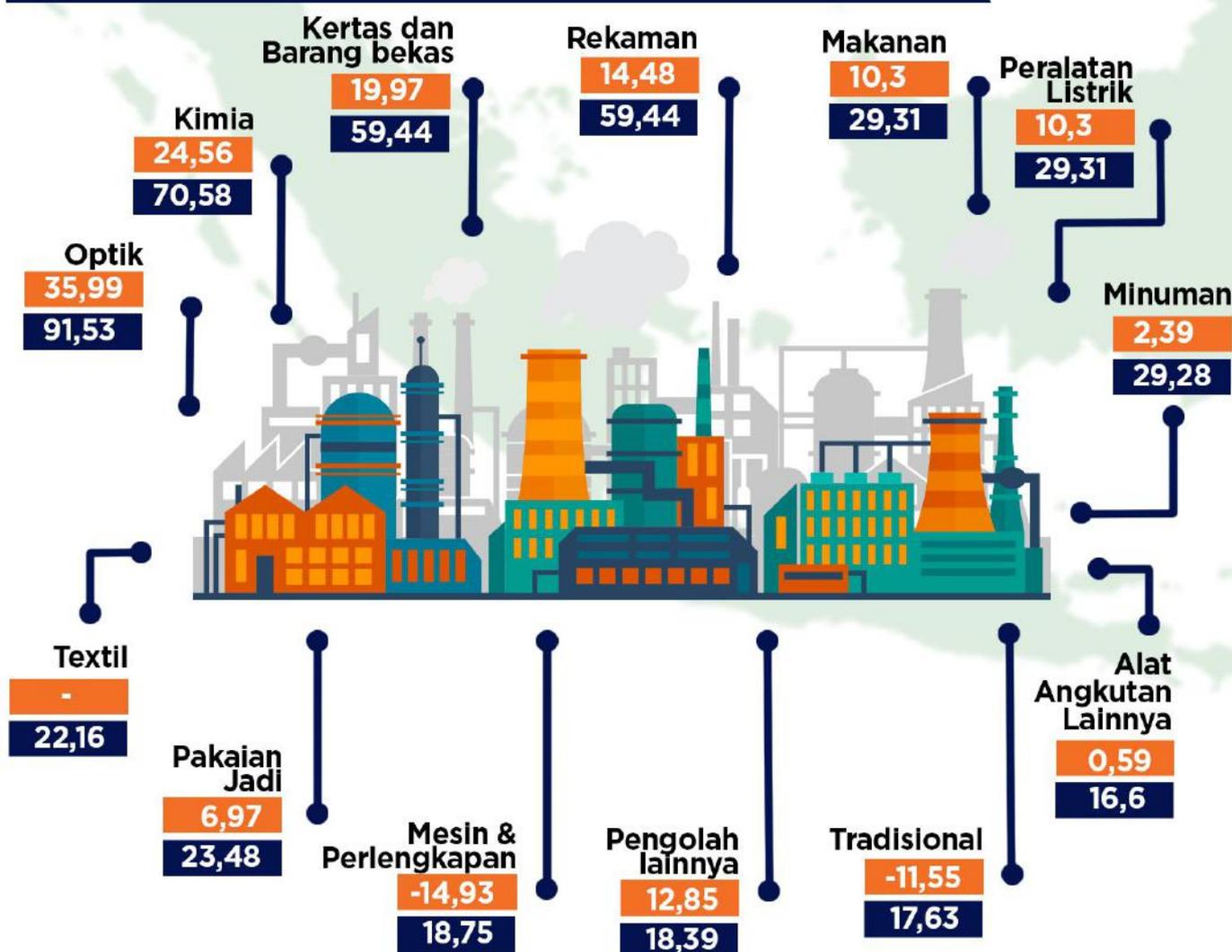
Sumber : BPS

BAB 3

Merawat Warisan Tahan Krisis

Khusus untuk industri kecil (di mana UMKM masuk di dalamnya), program KUR berujung pada kenaikan indeks produksi industri kecil, yang menandakan adanya geliat bisnis di sektor tersebut. Sepanjang periode 2014-2017, penurunan produksi industri kecil hanya terjadi di tiga subsektor yakni pengolahan tembakau, karet dan produksi peralatan (lihat tabel 7).

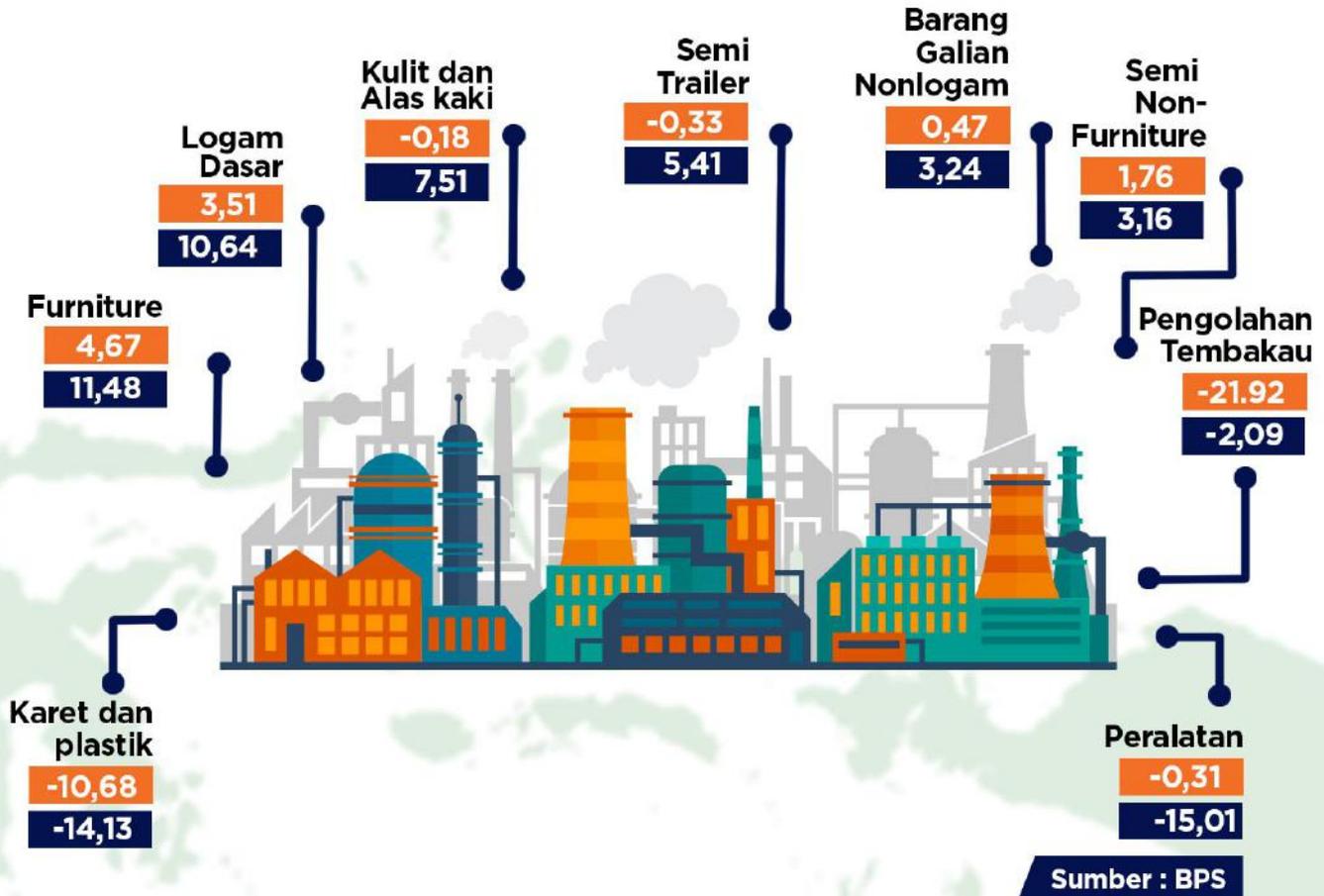
PERTUMBUHAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI KECIL



■ Tahun 2016-2017
■ Tahun 2014-2017

BAB 3

Merawat Warisan Tahan Krisis



Hanya saja, masih ada anomali program KUR berkaitan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pembukaan lapangan pekerjaan di sektor usaha mikro dan kecil terlihat tidak konsisten (lihat tabel 8). Ketika jumlah usaha mikro konsisten menguat pada 2015 dan 2016, jumlah tenaga kerja yang diserap justru menciut pada 2016. Di sisi lain, jumlah usaha kecil turun tipis pada 2015 diikuti penurunan jumlah tenaga kerja yang diserap, sebelum berbalik naik pada 2016.

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

TAHUN	JUMLAH USAHA MIKRO	JUMLAH USAHA KECIL	TENAGA KERJA MIKRO	TENAGA KERJA KECIL
2013	2.887.015	531.351	5.408.857	4.325.254
2014	3.220.563	284.501	6.039.855	2.322.891
2015	3.385.851	283.022	6.464.394	2.271.387
2016	4.011.922	361.899	6.424.952	2.926.753

Sumber : BPS

Merawat Warisan Tahan Krisis

Situasi ini sejalan dengan situasi alamiah program KUR yang umumnya memang menyasar para wirausahawan baru, yang tingkat kemampuan wirausahanya secara umum masih minim sehingga berpeluang mengalami kegagalan ataupun mengalami persoalan dalam perjalanan bisnisnya. Akibatnya, kontribusinya terhadap penambahan kerja terkadang tidak optimal.

Di sinilah peran pemerintah—dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga bank serta lembaga keuangan penyalur—perlu diperkuat dalam hal asistensi (pendampingan), sehingga program KUR tidak melenceng menjadi hibah yang sekadar dibagikan pada siapapun—terutama yang terafiliasi politik dengan penguasa.

Apalagi, kredit bermasalah (*non performing loan/ NPL*) KUR tahun lalu naik menjadi 3,3%, naik drastis dibandingkan NPL tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,37%.

Di tengah serbuan generasi milenial, program KUR semestinya bisa menjadi solusi untuk membantu para generasi digital tersebut untuk mendapatkan pendanaan guna mengembangkan ide bisnis dan startup mereka. Revolusi digital dengan segala tantangannya membuka peluang terciptanya UMKM-UMKM baru yang berorientasi digital. Asalkan, para kaum milenial tersebut memiliki keahlian wirausaha dan mengangkat keunggulan warisan Indonesia ke kancah global.***